



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**



**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

LPPD



PATUAN RAHMAT SYUKUR P HASIBUAN, S.STP., MM

Pj. BUPATI PADANG LAWAS UTARA

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA - TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.1.1. Penjelasan Umum	I-1
a. Undang Undang Pembentukan Daerah	I-1
b. Data Geografis Wilayah	I-2
c. Jumlah Penduduk	I-7
d. Jumlah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan	I-8
e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah	I-18
f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	I-32
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah	I-34
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	I-34
b. Visi Misi Kepala Daerah	I-35
c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	I-41
d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan	I-51
1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal	I-51
a. Dasar Pertimbangan Penerapan Standar Pelayanan Minimal	I-51
b. Kebijakan Umum Daerah	I-54
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	II-1
2.1. Capaian Kinerja Makro	II-1
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	II-1
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran	II-2
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil	II-38



2.2.3	Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan -----	II-67
2.3.	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah -----	II-72
a.	Target Kinerja Dalam Perjanjian Kerja -----	II-72
b.	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja-----	II-76
c.	Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya -----	II-79
d.	Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah -----	II-80
e.	Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dikaitkan dengan Hasil Kinerja yang Telah Tercapai -----	II-82
f.	Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja -----	II-90
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSAAN TUGAS PEMBANTUAN -----		III-1
3.1.	Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan -----	III-1
3.2.	Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan -----	III-2
3.3.	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan-----	III-2
3.3.1.	Target Kinerja-----	III-2
3.3.2.	Realisasi-----	III-3
3.4.	Permasalahan dan Kendala-----	III-7
3.5.	Saran dan Tindak Lanjut -----	III-7
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL -----		IV-1
4.1.	Urusan Pendidikan -----	IV-1
4.2.	Urusan Kesehatan -----	IV-6
4.3.	Urusan Pekerjaan Umum -----	IV-12
4.4.	Urusan Perumahan Rakyat-----	IV-15
4.5.	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum -----	IV-18
4.6.	Urusan Sosial -----	IV-24
BAB V PENUTUP -----		V-1

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Data Wilayah Administratif Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023-----	I-3
Tabel 1.2	Daftar Sungai Yang Melintas Di Kab. Padang lawas Utara -----	I-5
Tabel 1.3	Jumlah Penduduk Kabupaten Padang Lawas Utara -----	I-7
Tabel 1.4	Kecamatan, Desa, Kelurahan Padang Lawas Utara -----	I-8
Tabel 1.5	Organisasi Perangkat Daerah, Unit Kerja, Pegawai -----	I-18
Tabel 1.6	Realisasi APBD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023-----	I-32
Tabel 1.7	Keterkaitan Visi dan Misi Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019 – 2023-----	I-39
Tabel 1.8	Program Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara 2019 – 2023-----	I-43
Tabel 1.9	Keterkaitan Misi/Tujuan/Sasaran,Strategi, Arah Kebijakan dan Tahapan Pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023 -----	I-55
Tabel 2.1	Indikator Capaian Kinerja Makro-----	II-1
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Kunci Keluaran-----	II-2
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Kunci Hasil -----	II-38
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan-----	II-67
Tabel 2.5	Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023-----	II-73
Tabel 2.6	Capaian Kinerja Tahun 2023 -----	II-76
Tabel 2.7	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023 -----	II-79
Table 2.8	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 dan Target Perubahan RPJMD (2021 s/d 2023)-----	II-81
Tabel 2.9	Analisa Program Kegiatan untuk mencapai target Kinerja Tahun 2023 -----	II-90
Tabel 3.1	Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara -----	III-4



BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga atas perkenan-Nya penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2023 beserta Indikator Kinerja Kunci dalam rangka Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa "Bupati/ Walikota menyampaikan LPPD Kabupaten/ Kota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun", LPPD tahun 2023 disusun sesuai dengan sistematika penulisan sebagaimana yang telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.

Secara garis besar Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023 merupakan laporan yang berisi Capaian Kinerja Makro, Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan, dan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Mudah-mudahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Kunci ini dapat dijadikan dasar bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, akuntabel, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Billahi Taufik Wal Hidayah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD).

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Bupati Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2023 memuat mengenai kinerja penyelenggaraan pembangunan pemerintah selama satu tahun anggaran. LPPD Bupati Padang Lawas Utara disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai bahan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja pembangunan pemerintah daerah. Hasil evaluasi dokumen LPPD menjadi acuan bagi perbaikan kinerja pembangunan daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dimasa mendatang.

Penyusunan LPPD Bupati Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2023 mengacu kepada dokumen-dokumen pemerintah daerah diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2023 beserta perubahannya, Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA), Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 08 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.1.1. Penjelasan Umum

a. Undang Undang Pembentukan Daerah

Berdasarkan Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas Utara berasal dari sebagian wilayah

Kabupaten Tapanuli Selatan yang terdiri atas cakupan wilayah; Kecamatan Dolok Sigompulon, Kecamatan Dolok, Kecamatan Halongonan, Kecamatan Padang Bolak, Kecamatan Padang Bolak Julu, Kecamatan Portibi, Kecamatan Batang Onang dan Kecamatan Simangambat, dan ditambah dengan 10 Desa dari wilayah Kecamatan Padang Sidempuan Timur, yang nantinya akan dibentuk 1 (satu) Kecamatan.

Akhirnya Pada Tahun 2012 terbentuklah Kecamatan Hulu Sihapas sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Hulu Sihapas di Kabupaten Padang Lawas Utara yang terdiri dari 10 desa. Tahun 2016 Kabupaten Padang Lawas Utara membentuk 3 (tiga) Kecamatan lagi yakni Kecamatan Padang Bolak Tenggara, Kecamatan Halongonan Timur, dan Kecamatan Ujung Batu. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kecamatan Padang Bolak Tenggara, Kecamatan Halongonan Timur dan Kecamatan Ujung Batu di Kabupaten Padang Lawas Utara.

b. Data Geografis Wilayah

Secara geografis daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Berdasarkan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara memiliki luas 391.805 Ha yang terdiri dari 8 kecamatan yang kemudian dimekarkan menjadi 9 kecamatan pada tahun 2008, 388 desa dan 2 kelurahan. Pada tahun 2016, Kabupaten Padang Lawas Utara dimekarkan menjadi 12 wilayah kecamatan. Pada dasarnya selain sangat potensial sebagai daerah pertanian, peternakan dan perkebunan juga sangat prospektif untuk dikembangkan sebagai daerah transit dan jasa perdagangan khususnya hasil pertanian dan perkebunan karena posisi strategisnya berada pada jalur lintas Sumatera. Potensi ini sangat penting sehingga perlu dibuat terobosan peningkatan kualitas dan kuantitas produksi pertanian.

Peta Kabupaten Padang Lawas Utara



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Padang Lawas Utara

Luas wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara adalah berupa daratan seluas 3.918,05 km². Berdasarkan tabel di bawah ini, Kecamatan Padang Bolak merupakan wilayah paling luas diantara semua kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara dengan luas 699,06 km². Hal ini dikarenakan Kecamatan Padang Bolak merupakan pusat pemerintah daerah dengan ibukotanya Pasar Gunung Tua. Sedangkan wilayah terkecilnya adalah kecamatan Hulu Sihapas dengan luas wilayah 36,05 km².

Tabel 1.1
Data Wilayah Administratif
Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Daratan (Km ²)
Batang Onang	Pasar Matanggor	485,00
Padang Bolak Julu	Batu Gana	196,44
Portibi	Portibi Jae	246,13
Padang Bolak	Pasar Gunung Tua	699,06
Padang Bolak Tenggara	Naga Saribu	94,93
Simangambat	Langkimat	429,42
Ujung Batu	Ujung Batu Jae	269,62
Halongonan	Hutaimbaru	410,27
Halongonan Timur	Siancimun	181,33
Dolok	Pasar Sipinggot	525,27

Dolok Sigompulan	Pasar Simundol	262,56
Hulu Sihapas	Aek Nauli	36,05
Padang Lawas Utara		3.918,05

Sumber: Kab. Padang Lawas Utara dalam angka 2023

Adapun batas-batas wilayah administratif Kabupaten Padang Lawas Utara, adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Labuhan Batu dan Kabupaten Labuhan Batu Utara.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Riau.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan.

a. Letak dan kondisi geografis

Kabupaten Padang Lawas Utara terletak di Provinsi Sumatera Utara yang secara geografis terletak antara 1°13'50"-2°2'32" Lintang Utara dan antara 99°20'44"- 100°19'10 Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara adalah 3918,05 km² dengan ketinggian berkisar 0-1915 m diatas permukaan laut. Wilayah administrasi Kabupaten Padang Lawas Utara, yang meliputi 12 kecamatan serta memiliki 386 desa dan 2 kelurahan. Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki kondisi tanah yang luas dan biasanya jarang di tumbuhi pohon, dan hanya pohon tertentu yang relatif banyak, seperti : pohon Balakka (Sejenis Pohon Maja), pohon Hapadan, Haramoting, dan lain- lain.

b. Topografi

Secara topografis wilayah Padang Lawas Utara didominasi oleh kemiringan lahan curam yaitu 174.719 Ha atau 44,59 persen dari luas daerah dan diikuti dengan topografi bergunung seluas 137.640 Ha atau 35,13 persen. Topografi datar dan landai seluas 63.676 Ha atau 16,25 persen dari luas daerah serta topografi berbukit-bukit yaitu seluas 15.770 Ha atau 4,03 persen.

Kondisi faktual topografi daerah Kabupaten Padang Lawas Utara 16,25 persen dengan topografi datar dan landai secara garis besar sesuai untuk pengembangan budi daya pertanian tanaman pangan dan hortikultura dan 4,03 persen dengan topografi berbukit secara ideal sesuai untuk pengembangan budi daya perkebunan tanaman keras dan 79,72 % lainnya dengan topografi bergunung dan curam secara ideal pengembangannya berfungsi sebagai hutan lindung.

c. Hidrologi

Kondisi hidrologi di Kabupaten Padang Lawas Utara terdiri dari air permukaan yaitu sungai, danau dan air bawah tanah. Sungai yang ada dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari, sumber air minum dan untuk irigasi, sebagian wilayah di Kabupaten Padang Lawas Utara yang dilalui Satuan Wilayah Sungai lintas Provinsi dan lintas Kab/Kota, yaitu desa Sipiongot di Kecamatan Dolok yang dilalui oleh WS Barumun-Kualuh lintas Kab/Kota dan Satuan Wilayah Sungai Rokan lintas Provinsi. Terdapat Danau kecil di wilayah Kab Padang Lawas Utara yaitu Danau Tao dengan luas ± 25 Ha yang terdapat di Kecamatan Batang Onang yang potensinya belum dimanfaatkan dengan optimal bagi lahan pertanian dan pertambakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2
Daftar Sungai yang Melintas di Kab. Padang Lawas Utara

No	Nama Sungai	Panjang (Km)	Lintasan
1.	Batang Angkola	64,20	Kec. Padangsidempuan Timur/Hulu Sihapas , Kec. Batang Angkola, Kec. Sayurmasinggi Bermuara Di Sungai Batang Gadis Di Kab. Madina
2.	Batang Pane	91,96	Kec. Sipirok Dolok Hole, Kec. Padang Bolak , Kec. Portibi Bermuara Di Sungai Barumun Kec. Barumun Tengah

No	Nama Sungai	Panjang (Km)	Lintasan
3.	Batang Ilung	66,70	Kec. Padang Bolak Julu , Kec. Barumun Tengah, Kec. Huristak, Kec. Simangambat Bermuara Di Sungai Batang Pane Kec. Portibi
4.	Barumun	167,28	Kec. Ulu Barumun, Kec. Barumun Tengah, Kec. Huristak, Kec. Simangambat Bermuara Di Sungai Bilah Kab. Labuhan Batu
5.	Sungai Kanan	70,82	Kec. Padang Bolak , Kec. Halongonan Bermuara Di Kab. Labuhan Batu.
6.	Sungai Bilah	14,56	Kec. Aek Bilah, Kec. Dolok , Kec. Dolok Sigompulon , Kab. Labuhan Batu
7.	Aek Godang	77,79	Kec. Batang Onang , Kec. Padangsidimpuan Timur / Hulu Sihapas , Kec. Sipirok Bermuara Di Sungai Barumun

d. Kondisi Geologi

Secara geologis, wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki struktur tanah dan batuan yang kompleks dicirikan oleh bentuk bentang alam perbukitan. Tetapi sebagian wilayah potensial menimbulkan tanah longsor terhadap 40-50 % dari luas daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yang mencakup 5 wilayah kecamatan merupakan kawasan yang rentan gerakan tanah longsor.

e. Klimatologi

Berdasarkan data BPS Kabupaten Padang Lawas Utara dalam angka Tahun 2024, curah hujan bervariasi antar kecamatan, curah hujan tertinggi rata-rata mencapai 529,70 mm yang terjadi pada bulan Desember, sementara curah hujan terendah rata-rata mencapai 32,90 mm yang terjadi pada bulan Juni. Karena Kabupaten Padang Lawas Utara terletak dekat garis khatulistiwa, sehingga tergolong kedalam daerah beriklim tropis. Ketinggian

permukaan daratan Kabupaten Padang Lawas Utara berada pada 52 – 392 meter diatas permukaan laut.

Rata-rata temperatur di Kabupaten Padang Lawas Utara sebesar 26,1°C dengan suhu maksimum 34,8°C dan suhu minimum 19,8°C. Dengan mempertimbangkan bahwa perubahan suhu udara di suatu daerah dapat diprediksi perbedaannya, maka suhu di daerah tersebut dapat dihitung.

c. Jumlah Penduduk

Gambaran umum demografis Kabupaten Padang Lawas Utara pada umumnya bertempat tinggal menetap dan merupakan masyarakat dari berbagai etnis yaitu Batak Angkola, Mandailing, Batak Toba, Jawa, Minang, Padang, yang mayoritas bermata pencaharian: Pertanian, Perkebunan, dan Perdagangan

Berdasarkan hasil pendataan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, jumlah penduduk Kabupaten Padang Lawas Utara Pada Tahun 2023 adalah sebanyak 272.124 orang, Laki-laki sebanyak 137.800 dan perempuan sebanyak 134.324, hal ini dapat kita lihat pada tabel dibawah ini;

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Kabupaten Padang Lawas Utara

No	Kecamatan	Laki - laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1	2	3	4	5
1.	Dolok Sigompulon	8.513	8.162	16.675
2.	Dolok	13.198	12.637	25.835
3.	Halongonan	11.287	10.954	22.241
4.	Padang Bolak	28.473	27.979	56.452
5.	Padang Bolak Julu	6.243	6.335	12.578
6.	Portibi	14.610	14.474	29.084
7.	Batang Onang	7.808	7.660	15.468
8.	Simangambat	20.623	19.737	40.360
9.	Hulu Sihapas	2.904	2.817	5.721
10.	Padang Bolak Tenggara	6.255	6.414	12.669
11.	Halongonan Timur	11.677	11.158	22.835
12.	Ujung Batu	6.209	5.997	12.206
Jumlah		137.800	134.324	272.124

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan

Wilayah administrasi Kabupaten Padang Lawas Utara, yang meliputi 12 kecamatan serta memiliki 386 desa dan 2 kelurahan yang dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.4
Kecamatan, Desa, Kelurahan
Kabupaten Padang Lawas Utara

KECAMATAN	KELURAHAN	DESA
12	2	386
1. Batang Onang	1	32
	1. Pasar Sayur Matinggi	1. Batang Onang Baru
		2. Batang Onang Lama
		3. Batu Mamak
		4. Batu Nanggar
		5. Batu Pulut
		6. Bonan Dolok
		7. Galanggang
		8. Gunungtua Batang Onang
		9. Gunungtua Julu
		10. Gunungtua Tumbu Jati
		11. Huta Lambung
		12. Janji Manahan
		13. Janji Mauli
		14. Morang
		15. Padang Bujur Baru
		16. Padang Garugur
		17. Padang Matinggi
		18. Pagaran Batu
		19. Pangkal Dolok Julu
		20. Pangkal Dolok Lama
		21. Parau Sorat
		22. Pasar Matanggor
		23. Pasir Ampolu Hopong
		24. Pintu Padang
		25. Purba Tua
		26. Sayur Matinggi Julu
		27. Simanapang
		28. Simangambat Dolok
		29. Simaninggir
		30. Simardona
		31. Tamosu



KECAMATAN	KELURAHAN	DESA
12	2	386
2. Hulu Sihapas		10
		1. Aek Godang
		2. Aek Nauli
		3. Pangirkiran
		4. Parmeraan
		5. Pintu Bosi
		6. Sampuran Simarloting
		7. Sidongdong
		8. Simaninggir
		9. Sitabar
		10. Sukadame
3. Ujung Batu		13
		1. Gunung Manaon UB
		2. Huta Raja
		3. Jambu Tonang
		4. Labuhan Jurung
		5. Mananti
		6. Manare Tua
		7. Marlaung
		8. Martujuan
		9. Pasir Lancat UB
		10. Paya Bahung UB
		11. Tobing Tinggi UB
		12. Ujung Batu Jae
		13. Ujung Batu Julu
4. Halongonan Timur		14
		1. Batang Pane I
		2. Batang Pane II
		3. Batang Pane III
		4. Bolatan
		5. Gunung Intan
		6. Gunung Manaon III
		7. Hutabaru Nangka
		8. Mompang I
		9. Pasir Bara
		10. Rondaman
		11. Siancimun
		12. Sihopuk Baru
		13. Sihopuk Lama
		14. Situmbaga



KECAMATAN	KELURAHAN	DESA
12	2	386
5. Portibi		36
		1. Aek Haruaya
		2. Aek Siala
		3. Aek Torop
		4. Aloban
		5. Bahal
		6. Balakka Torop
		7. Bangkudu
		8. Bara
		9. Gumarupu Baru
		10. Gumarupu Lama
		11. Gunung Baringin
		12. Gunung Manaon III
		13. Gunung Martua
		14. Hadungdung
		15. Hotang Sasa
		16. Janji Matogu
		17. Lantosani I
		18. Mangaledang
		19. Mangaledang Lama
		20. Muara Sigama
		21. Napa Halas
		22. Napa Lombang
		23. Padang Manjoir
		24. Parsarmaan
		25. Pasir Pinang
		26. Portibi Jae
		27. Portibi Julu
		28. Rondaman Dolok
		29. Rondaman Lombang
		30. Sigama Napahalas
		31. Sihambeng
		32. Simandiangan
		33. Sipirok
		34. Sitopayan
		35. Tanjung Selamat
		36. Torluk Muara Dolok
6. Dolok Sigompulon		44
		1. Aek Jabut
		2. Aek Kanan
		3. Aek Kundur



KECAMATAN	KELURAHAN	DESA
12	2	386
		4. Aek Simanat
		5. Batu Hibul
		6. Gadung Holbung
		7. Gonting Bange
		8. Gunung Sormin
		9. Hasahatan
		10. Hatiran
		11. Hutaimbaru
		12. Janji Manahan Gnt
		13. Karang Anyer
		14. Kuala Simpang
		15. Malino
		16. Nabundong
		17. Nahula Jae
		18. Nahula Julu
		19. Padang Malakka
		20. Padang Matinggi Gnt
		21. Padang Matinggi Sim
		22. Pamarai
		23. Pamonoran
		24. Panyabungan
		25. Pasang Lela
		26. Pasar Sayur Matinggi
		27. Pasar Simundol
		28. Pinarik
		29. Pulo Liman
		30. Sababangunan
		31. Salusuhan
		32. Sayur Matinggi
		33. Sigordang
		34. Sihalo Halo
		35. Simadihon
		36. Simangambat
		37. Simaninggir Sim
		38. Simundol
		39. Sipogas A
		40. Sipogas B
		41. Sitonun
		42. Sunut
		43. Tj Baru Silaiya
		44. Unte Manis



KECAMATAN	KELURAHAN	DESA
12	2	386
7. Padang Bolak	1	61
	1. Pasar Gunungtua	1. Aek Gambir
		2. Aek Jangkang
		3. Aek Suhat
		4. Ambasang Natigor
		5. Batang Baruhar Jae
		6. Batang Baruhar Julu
		7. Batu Mamak
		8. Batu Sundung
		9. Batu Tambun
		10. Botung
		11. Bukit Raya Serdang
		12. Dolok Sae
		13. Garoga
		14. Garonggang
		15. Gunung Manaon II
		16. Gunungtua Baru
		17. Gunungtua Jae
		18. Gunungtua Julu
		19. Gunungtua Tonga
		20. Hajoran
		21. Hambiri
		22. Huta Lombang
		23. Hutaimbaru II
		24. Liang Asona
		25. Losung Batu
		26. Lubuk Torop
		27. Mananti
		28. Nabonggal
		29. Napagadung Laut
		30. Padang Garugur
		31. Pagaran Singkam
		32. Pagaran Tonga
		33. Parang Padang
		34. Parlimbatan
		35. Purba Sinomba
		36. Purba Tua
		37. Rahuning Jae
		38. Rampa Jae
		39. Rampa Julu
		40. Saba Bangunan



KECAMATAN	KELURAHAN	DESA
12	2	386
		41. Saba Sitahul-Tahul
		42. Sampuran
		43. Sibagasi
		44. Sibatang kayu
		45. Sidingkat
		46. Sigama
		47. Sigama Ujung Gading
		48. Sigimbal
		49. Sihapas-hapas
		50. Simandiingin Dolok
		51. Simandiingin Lombang
		52. Simanosor
		53. Simasi
		54. Simbolon
		55. Siombob
		56. Sosopan
		57. Sungai Durian
		58. Sungai Orosan
		59. Sungai Tolang
		60. Tanjung Marulak
		61. Tanjung Tiram
8. Halongonan		33
		1. Balimbing
		2. Bargottopong Jae
		3. Bargottopong Julu
		4. Batu Tunggal
		5. Halongonan
		6. Hambulo
		7. Hasahatan
		8. Hiteurat
		9. Hutaimbaru
		10. Hutanopan
		11. Japinulik
		12. Napa Lancat
		13. Pagar Gunung
		14. Pangarambangan
		15. Pangirkiran
		16. Paolan
		17. Paran Honas
		18. Rondaman Siburegar
		19. Saba



KECAMATAN	KELURAHAN	DESA
12	2	386
		20. Sandean Jae
		21. Sandean Julu
		22. Sandean Tonga
		23. Siboruangin
		24. Sigala-gala
		25. Silantoyung
		26. Sipaho
		27. Sipenggeng
		28. Siringki Jae
		29. Siringki Julu
		30. Sitabola
		31. Sitonun
		32. Tapus Jae
		33. Ujung Padang
9. Padang Bolak Tenggara		14
		1. Aek Bayur
		2. Aek Tolong
		3. Bangun Purba
		4. Gulangan
		5. Mompang II
		6. Nagasaribu
		7. Pijorkoling
		8. Purbatua Dolok
		9. Sihoda-hoda
		10. Simainggir
		11. Siunggam Jae
		12. Siunggam Julu
		13. Siunggam Tonga
		14. Tangga-tangga Hambeng
10. Simangambat		21
		1. Aek Raru
		2. Gunung Manaon Sim
		3. Huta Baringin
		4. Huta Baru
		5. Huta Pasir
		6. Jabi Jabi
		7. Janji Matogu
		8. Kosik Putih
		9. Langkimat
		10. Mandasip



KECAMATAN	KELURAHAN	DESA
12	2	386
		11. Paran Padang
		12. Paran Tonga Sim
		13. Sigagan
		14. Simangambat Jae
		15. Simangambat Julu
		16. Sionggoton
		17. Tanjung Botung
		18. Tanjung Maria
		19. Ujung Gading Jae
		20. Ujung Gading Julu
		21. Ulak Tano
11.Dolok		86
		1. Aek Haruaya
		2. Aek Ilung
		3. Aek Rao TN
		4. Aek Suhat Jae
		5. Aek Suhat TR
		6. Aek Sundur
		7. Aek Tangga
		8. Arse
		9. Bahap
		10. Bandar Nauli
		11. Baringin Sil
		12. Baringin Sip
		13. Batu Runding
		14. Binanga Gumbot
		15. Binanga Panasahan
		16. Bintaish Julu
		17. Bukit Tinggi
		18. Bunut
		19. Dalihan Natolu
		20. Dolok Sanggul
		21. Gumaruntar
		22. Gumbot
		23. Gunung Maria
		24. Gunung Selamat
		25. Huala Baringin
		26. Huta Baru Sip
		27. Hutabaru Sil
		28. Hutaimbaru Gul
		29. Jambur Batu



KECAMATAN	KELURAHAN	DESA
12	2	386
		30. Janji Manahan Gul
		31. Janji Manahan Sil
		32. Janji Matogu
		33. Lubuk Godang
		34. Lubuk Kundur
		35. Lubuk Lanjang
		36. Mompang Dolok
		37. Mompang Lombang
		38. Nabonggal
		39. Naga Saribu
		40. Napasundali
		41. Pagaran Julu I
		42. Pagaran Julu II
		43. Pagaran Siregar
		44. Panca
		45. Parigi
		46. Parmeraan
		47. Pasar Sipiongot
		48. Paya Ombik
		49. Pijor Koling
		50. Pintu Padang Merdeka
		51. Purba Tua
		52. Rancaran
		53. Rongkare
		54. Siala Gundi
		55. Sialang Dolok
		56. Sibayo
		57. Sibayo Jae
		58. Sibio Bio
		59. Siburbur
		60. Sigala Gala
		61. Siguga
		62. Sijantung Jae
		63. Sijantung Julu
		64. Sijara Jara
		65. Sijorang
		66. Silangge
		67. Silogo Logo
		68. Siloung
		69. Simambal
		70. Simangambat Tua



KECAMATAN	KELURAHAN	DESA
12	2	386
		71. Simaninggir Sip
		72. Simanosor
		73. Simataniari
		74. Simataniari Jae
		75. Simatorkis
		76. Sinabongan
		77. Singanyal
		78. Sipiongot
		79. Siraga HP
		80. Siranap
		81. Situmbaga
		82. Sungai Datar
		83. Sungai Pining
		84. Tanjung Baru B
		85. Tanjung Longat
		86. Tarutung Bolak
12.Padang Bolak Julu		23
		1. Aek Bargot
		2. Balakka
		3. Balimbing Jae
		4. Balimbing Julu
		5. Batu Gana
		6. Batu Rancang
		7. Gariang
		8. Hasambi
		9. Lantosan II
		10. Padang Baruas
		11. Padang Bujur
		12. Pamuntaran
		13. Pancur Pangko
		14. Paran Gadung
		15. Paran Nangka
		16. Parupuk Jae
		17. Parupuk Julu
		18. Sialang
		19. Sipupus Lombang
		20. Sitanggoru
		21. Siunggam Dolok
		22. Sobar
		23. Ubar

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja dan Jumlah Pegawai di Kabupaten Padang Lawas Utara dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.5
Organisasi Perangkat Daerah, Unit Kerja, Pegawai

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI
1	2	3	4
1.	SEKRETARIAT DAERAH	1. BAGIAN PEMERINTAHAN	50
		2. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		3. BAGIAN HUKUM	
		4. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	
		5. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
		6. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		7. BAGIAN UMUM	
		8. BAGIAN ORGANISASI	
		9. BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	
		10. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	
		11. KELOMPOK JABATAN PELAKSANA	
2.	SEKRETARIAT DPRD	12. BAGIAN UMUM	23
		13. BAGIAN HUKUM DAN PERSIDANGAN	



NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI
1	2	3	4
		14. BAGIAN PENGANGGURAN DAN PENGAWASAN	
		15. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	
		16. KELOMPOK JABATAN PELAKSANA	
3.	INSPEKTORAT	17. SEKRETARIAT	30
		18. INSPEKTUR PEMBANTU I	
		19. INSPEKTUR PEMBANTU II	
		20. INSPEKTUR PEMBANTU III	
		21. INSPEKTUR PEMBANTU IV	
		22. INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS	
		23. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	
		24. KELOMPOK JABATAN PELAKSANA	
4.	DINAS KETAHANAN PANGAN	25. SEKRETARIAT	17
		26. BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN	
		27. BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	
		28. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	
		29. KELOMPOK JABATAN PELAKSANA	
5.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	30. SEKRETARIAT	13
		31. BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KARAKTER BANGSA	
		32. BIDANG POLITIK DALAM NEGERI	
		33. BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
		34. BIDANG PENANGANAN KONFLIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL	



NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI
1	2	3	4
		35. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	
		36. KELOMPOK JABATAN PELAKSANA	
6.	DINAS PERHUBUNGAN	37. SEKRETARIAT	16
		38. BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	
		39. BIDANG PRASARANA DAN KESELAMATAN	
		40. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	
		41. KELOMPOK JABATAN PELAKSANA	
7.	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	42. SEKRETARIAT	28
		43. BIDANG PERENCANAAN EKONOMI	
		44. BIDANG SOSIAL, BUDAYA DAN PEMERINTAHAN	
		45. BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH	
		46. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	
		47. KELOMPOK JABATAN PELAKSANA	
8.	DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	48. SEKRETARIAT	29
		49. BIDANG PERIKANAN	
		50. BIDANG PETERNAKAN	
		51. BIDANG KESEHATAN HEWAN DAN MASYARAKAT VETERNIER	
		52. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	
		53. KELOMPOK JABATAN PELAKSANA	
		54. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH	
9.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	55. SEKRETARIAT	36
		56. BIDANG PENDAPATAN	
		57. BIDANG PBB DAN BPHTB	
		58. BIDANG ANGGARAN	



NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI
1	2	3	4
		59. BIDANG ASET	
		60. BIDANG PERBENDAHARAAN	
		61. BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN	
		62. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	
		63. KELOMPOK JABATAN PELAKSANA	
10.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	64. SEKRETARIAT	11
		65. BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	
		66. BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK	
		67. BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	
		68. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	
		69. KELOMPOK JABATAN PELAKSANA	
11.	DINAS SOSIAL	70. SEKRETARIAT	16
		71. BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
		72. BIDANG REHABILITASI SOSIAL	
		73. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN	
		74. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	
		75. KELOMPOK JABATAN PELAKSANA	
12.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	76. SEKRETARIAT	19
		77. BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH	
		78. BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	



NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI
1	2	3	4
		79. BIDANG PEMADAM KEBAKARAN	
		80. BIDANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
		81. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	
		82. KELOMPOK JABATAN PELAKSANA	
13.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	83. SEKRETARIAT	25
		84. BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN	
		85. BIDANG MUTASI DAN PROMOSI	
		86. BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR	
		87. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	
		88. KELOMPOK JABATAN PELAKSANA	
14.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	89. SEKRETARIAT	22
		90. BIDANG PERINDUSTRIAN	
		91. BIDANG PERDAGANGAN	
		92. BIDANG PASAR	
		93. BIDANG PROMOSI DAN METROLOGI	
		94. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	
		95. KELOMPOK JABATAN PELAKSANA	
15.	DINAS PENDIDIKAN	96. SEKRETARIAT	1.589
		97. BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL	
		98. BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR	
		99. BIDANG PEMBINAAN SMP	



NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI
1	2	3	4
		100. BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN	
		101. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	
		102. KELOMPOK JABATAN PELAKSANA	
		103. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH	
16.	DINAS PERTANIAN	104. SEKRETARIAT	78
		105. BIDANG TANAMAN DAN HORTIKULTURA	
		106. BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	
		107. BIDANG PERKEBUNAN	
		108. BIDANG PENYULUHAN	
		109. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	
		110. KELOMPOK JABATAN PELAKSANA	
		111. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH	
17.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	112. SEKRETARIAT	16
		113. BIDANG TATA LINGKUNGAN HIDUP	
		114. BIDANG PENGENDALIAN LINGKUNGAN	
		115. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	
		116. KELOMPOK JABATAN PELAKSANA	
18.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	117. SEKRETARIAT	31
		118. BIDANG CIPTA KARYA	
		119. BIDANG BINA MARGA	
		120. BIDANG SUMBER DAYA AIR	
		121. BIDANG PEMBINAAN KONSTRUKSI DAN PERALATAN	
		122. BIDANG TATA RUANG	
		123. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	



NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI
1	2	3	4
		124. KELOMPOK JABATAN PELAKSANA	
		125. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH	
19.	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	126. SEKRETARIAT	20
		127. BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA	
		128. BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA	
		129. BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA	
		130. BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA	
		131. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	
		132. KELOMPOK JABATAN PELAKSANA	
20.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	133. SEKRETARIAT	25
		134. BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI DESA	
		135. BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	
		136. BIDANG PEMERINTAHAN DESA	
		137. BIDANG PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN SOSIAL BUDAYA	
		138. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	
		139. KELOMPOK JABATAN PELAKSANA	
21.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	140. SEKRETARIAT	17
		141. BIDANG INFORMASI DAN STATISTIK	
		142. BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK	



NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI
1	2	3	4
		143. BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	
		144. BIDANG LAYANAN E-GOVERNMENT	
		145. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	
		146. KELOMPOK JABATAN PELAKSANA	
22.	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	147. SEKRETARIAT	20
		148. BIDANG SARANA PRASARANA DAN PENGEMBANGAN OBJEK WISATA	
		149. BIDANG PEMASARAN PARIWISATA	
		150. BIDANG KEBUDAYAAN	
		151. BIDANG KESENIAN	
		152. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	
		153. KELOMPOK JABATAN PELAKSANA	
23.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	154. SEKRETARIAT	37
		155. BIDANG ADVOKASI, KIE DAN PENGGERAKAN	
		156. BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	
		157. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK	
		158. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		159. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	
		160. KELOMPOK JABATAN PELAKSANA	
		161. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH	
24.		162. SEKRETARIAT	21



NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI
1	2	3	4
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	163. BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK 164. BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL 165. BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 166. BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN 167. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 168. KELOMPOK JABATAN PELAKSANA	
25.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	169. SEKRETARIAT 170. BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN IKLIM DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL 171. BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL 172. BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN 173. BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN 174. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 175. KELOMPOK JABATAN PELAKSANA	13
26.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	176. SEKRETARIAT 177. BIDANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN	23



NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI
1	2	3	4
		178. BIDANG LAYANAN, ALIH MEDIA, DAN OTOMASI PERPUSTAKAAN PELESTARIAN DAN KERJASAMA	
		179. BIDANG PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA	
		180. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	
		181. KELOMPOK JABATAN PELAKSANA	
27.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	182. SEKRETARIAT	14
		183. BIDANG PERUMAHAN	
		184. BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN	
		185. BIDANG PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN TANAH	
		186. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	
		187. KELOMPOK JABATAN PELAKSANA	
28.	DINAS KESEHATAN	188. SEKRETARIAT	834
		189. BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	
		190. BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	
		191. BIDANG PELAYANAN KESEHATAN	
		192. BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN	
		193. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	
		194. KELOMPOK JABATAN PELAKSANA	
		195. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH	
29.		196. SEKRETARIAT	17



NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI
1	2	3	4
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN	197. BIDANG PELATIH KERJA DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	
		198. BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA	
		199. BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN	
		200. BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
		201. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	
		202. KELOMPOK JABATAN PELAKSANA	
30.	KECAMATAN BATANG ONANG	203. SEKRETARIAT	23
		204. SEKSI PEMERINTAHAN	
		205. SEKSI PEMBANGUNAN	
		206. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	
		207. SEKSI PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	
		208. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PERPUSTAKAAN	
		209. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	
		210. KELOMPOK JABATAN PELAKSANA	
31.	KECAMATAN HULU SIHAPAS	211. SEKRETARIAT	18
		212. SEKSI PEMERINTAHAN	
		213. SEKSI PEMBANGUNAN	
		214. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	
		215. SEKSI PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	
		216. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PERPUSTAKAAN	



NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI
1	2	3	4
		217. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	
		218. KELOMPOK JABATAN PELAKSANA	
32	KECAMATAN PADANG BOLAK JULU	219. SEKRETARIAT	25
		220. SEKSI PEMERINTAHAN	
		221. SEKSI PEMBANGUNAN	
		222. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	
		223. SEKSI PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	
		224. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PERPUSTAKAAN	
		225. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	
		226. KELOMPOK JABATAN PELAKSANA	
33.	KECAMATAN PADANG BOLAK TENGGARA	227. SEKRETARIAT	15
		228. SEKSI PEMERINTAHAN	
		229. SEKSI PEMBANGUNAN	
		230. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	
		231. SEKSI PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	
		232. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PERPUSTAKAAN	
		233. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	
		234. KELOMPOK JABATAN PELAKSANA	
34.	KECAMATAN PADANG BOLAK	235. SEKRETARIAT	40
		236. SEKSI PEMERINTAHAN	
		237. SEKSI PEMBANGUNAN	
		238. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	
		239. SEKSI PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI
1	2	3	4
		240. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PERPUSTAKAAN	
		241. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	
		242. KELOMPOK JABATAN PELAKSANA	
35.	KECAMATAN PORTIBI	243. SEKRETARIAT	42
		244. SEKSI PEMERINTAHAN	
		245. SEKSI PEMBANGUNAN	
		246. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	
		247. SEKSI PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	
		248. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PERPUSTAKAAN	
		249. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	
		250. KELOMPOK JABATAN PELAKSANA	
36.	KECAMATAN HALONGONAN	251. SEKRETARIAT	29
		252. SEKSI PEMERINTAHAN	
		253. SEKSI PEMBANGUNAN	
		254. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	
		255. SEKSI PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	
		256. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PERPUSTAKAAN	
		257. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	
		258. KELOMPOK JABATAN PELAKSANA	
37.	KECAMATAN HALONGONAN TIMUR	259. SEKRETARIAT	20
		260. SEKSI PEMERINTAHAN	
		261. SEKSI PEMBANGUNAN	
		262. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	



NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI
1	2	3	4
		263. SEKSI PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	
		264. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PERPUSTAKAAN	
		265. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	
		266. KELOMPOK JABATAN PELAKSANA	
38.	KECAMATAN UJUNG BATU	267. SEKRETARIAT	14
		268. SEKSI PEMERINTAHAN	
		269. SEKSI PEMBANGUNAN	
		270. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	
		271. SEKSI PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	
		272. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PERPUSTAKAAN	
		273. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	
		274. KELOMPOK JABATAN PELAKSANA	
39.	KECAMATAN SIMANGAMBAT	275. SEKRETARIAT	22
		276. SEKSI PEMERINTAHAN	
		277. SEKSI PEMBANGUNAN	
		278. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	
		279. SEKSI PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	
		280. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PERPUSTAKAAN	
		281. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	
		282. KELOMPOK JABATAN PELAKSANA	
40.	KECAMATAN DOLOK	283. SEKRETARIAT	68
		284. SEKSI PEMERINTAHAN	
		285. SEKSI PEMBANGUNAN	



NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI
1	2	3	4
		286. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	
		287. SEKSI PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	
		288. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PERPUSTAKAAN	
		289. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	
		290. KELOMPOK JABATAN PELAKSANA	
41.	KECAMATAN DOLOK SIGOMPULON	291. SEKRETARIAT	44
		292. SEKSI PEMERINTAHAN	
		293. SEKSI PEMBANGUNAN	
		294. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	
		295. SEKSI PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	
		296. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PERPUSTAKAAN	
		297. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	
		298. KELOMPOK JABATAN PELAKSANA	

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.6
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023

No. Urut	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)
4	PENDAPATAN DAERAH	1.194.371.801.776,00	1.143.774.105.411,00	95,76
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	46.920.768.816,00	46.383.866.055,00	98,86
4.1.1	Pajak Daerah	16.915.519.986,00	18.870.178.076,00	111,56



No. Urut	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)
4.1.2	Retribusi Daerah	21.561.666.366,00	20.227.318.495,00	93,81
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.715.974.868,00	1.715.974.868,00	100,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	6.727.607.596,00	5.570.331.616,01	82,80
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.136.485.082.510,00	1.090.456.917.839,00	95,95
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.091.406.160.045,00	1.045.417.307.374,00	95,79
4.2.1.1	Dana Perimbangan	797.205.663.045,00	754.719.368.909,00	94,67
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	0	0	0,00
4.2.1.5	Dana Desa	294.200.497.000,00	290.697.938.465,00	98,81
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	45.078.922.465,00	45.039.610.465,00	99,91
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	41.078.922.465,00	45.039.610.465,00	109,64
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10.965.950.450,00	6.933.321.517,00	63,23
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10.965.950.450,00	6.933.321.517,00	63,23
5	BELANJA DAERAH	1.232.634.313.548,00	1.122.954.262.015,00	91,10
5.1	BELANJA OPERASI	740.149.534.707,00	653.233.504.698,00	88,26
5.1.1	Belanja Pegawai	411.514.699.560,00	371.071.722.977,00	90,17
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	288.135.322.974,00	249.395.673.775,00	86,56
	Belanja Bunga	10.854.002.214,00	10.511.982.946,00	96,85
5.1.5	Belanja Hibah	28.024.509.959,00	20.765.085.000,00	74,10
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.621.000.000,00	1.489.040.000,00	91,86
5.2	BELANJA MODAL	133.158.583.005,00	113.969.243.616,00	85,59
5.2.1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.730.376.210,00	36.401.922.336,00	91,62
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18.365.580.813,00	17.778.361.000,00	96,80
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	70.447.202.229,00	58.182.406.920,00	82,59
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.615.423.753,00	1.606.553.360,00	34,81
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.000.000.000,00	2.955.988.000,00	98,53

No. Urut	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	2.955.988.000,00	98,53
5.4	BELANJA TRANSFER	356.326.195.836,00	352.795.525.701,00	99,01
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	3.847.718.636,00	1.693.988.999,00	44,03
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	352.478.477.200,00	348.975.918.665,00	99,01
	SURFLUS/ (DEFISIT)	(38.262.511.772,00)	20.819.843.396,01	-54,41
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	54.188.621.572,00	54.188.621.572,98	100,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	54.188.621.572,00	54.188.621.572,98	100,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	15.926.109.800,00	15.926.109.800,00	100,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	0	0	0,00
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	15.926.109.800,00	15.926.109.800,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	38.262.511.772,00	38.262.511.772,98	100,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0	59.082.355.168,99	0,00

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Penuntasan permasalahan pembangunan merupakan salah satu esensi dari tujuan pembangunan daerah sehingga kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan tahap demi tahap. Oleh karena itu, permasalahan pembangunan menjadi salah satu rujukan utama dalam merumuskan setiap arah kebijakan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah bersifat kompleks baik bersumber dari permasalahan sektoral maupun wilayah. Dengan kebijakan yang tepat akan menghasilkan rumusan program dan kegiatan yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan. Untuk itu, hasil pengendalian dan evaluasi hasil pembangunan periode lalu penting untuk memahami sejauh mana efisiensi dan efektivitas kebijakan pembangunan di masa lalu dalam memecahkan berbagai permasalahan. Dari hasil evaluasi terhadap gambaran umum kondisi daerah dan analisis permasalahan pembangunan, permasalahan utama Kabupaten Padang Lawas Utara adalah

“Belum Meratanya Kesejahteraan pada Seluruh Lapisan Masyarakat Padang Lawas Utara”. Indikasi lebih lanjut atas permasalahan pokok yang dimaksud dan menjadi perhatian utama dalam perumusan kebijakan pembangunan dalam tiga tahun mendatang adalah sebagai berikut.

1. Masih rendahnya kualitas daya saing SDM;
2. Belum optimalnya pembangunan perekonomian daerah;
3. Belum meratanya pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah yang berwawasan lingkungan;
4. Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik; dan
5. Menurunnya perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

b. Visi Misi Kepala Daerah

1. Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari visi bupati dan wakil bupati terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode 2019-2023 adalah:

**“BERSAMA MEMBANGUN PADANG LAWAS UTARA BERIMAN,
CERDAS, MAJU DAN BERADAT”**

Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu :

BERIMAN : Dalam rangka pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara harus disertai dengan nilai-nilai agama serta menghormati dan melindungi kerukunan umat beragama. Masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara meyakini kebenaran ajaran dan nilai-nilai agama/ kepercayaan serta mengamalkannya dalam wujud keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tindakan nyata dalam

keseharian, dengan menjunjung tinggi toleransi dan kepedulian dalam menjalankan kehidupannya.

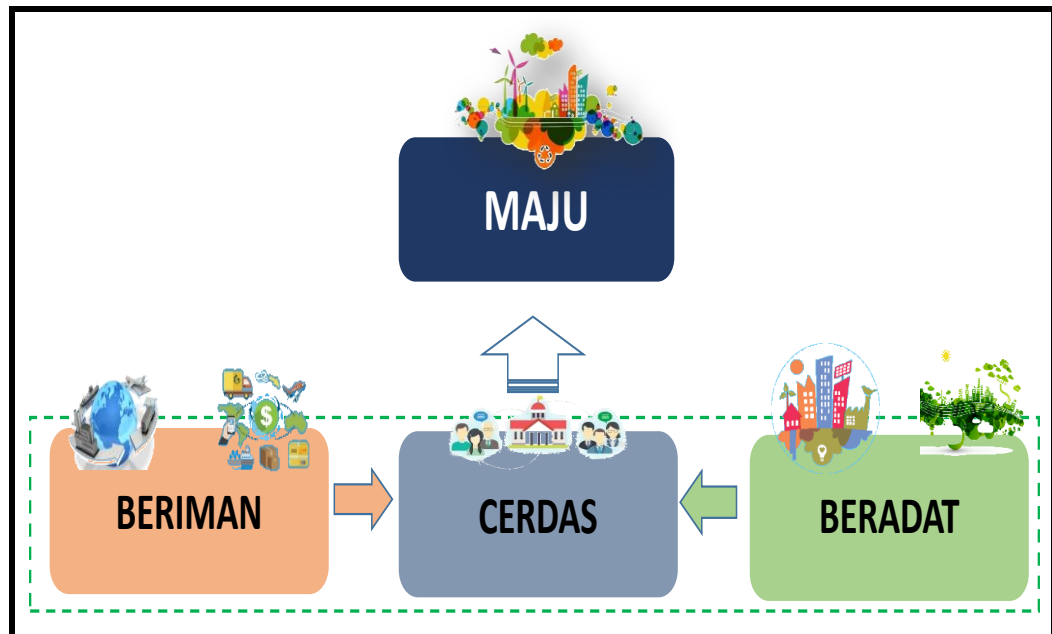
CERDAS : Kapasitas kemampuan dan keterampilan suatu daerah untuk mengelola manajemen pemerintahan serta mendayagunakan segenap potensi sumberdaya yang dimiliki (ekonomi, sosial, budaya, sumberdaya alam dan energi) berbasis kearifan lokal dan menurunnnya disparitas pembangunan antar wilayah serta tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup.

MAJU : Kabupaten Padang Lawas Utara diarahkan pada semakin efektifnya pelaksanaan pemerintahan yang bersih dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang responsif, merata, berkualitas, dan berbasis kemajuan teknologi.

BERADAT : Pengamalan dan pemberdayaan nilai-nilai luhur adat budaya daerah yang menjunjung semangat kekerabatan dan gotong royong akan dijadikan wadah utama untuk melibatkan partisipasi kelompok masyarakat dalam pembangunan.

Dalam visi pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara diatas mempunyai elemen visi yang memiliki keterkaitan yang secara tidak langsung menjadi harapan dari pencapaian pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara dalam waktu 5 tahun kedepan. Keempat elemen visi Kabupaten Padang Lawas Utara ini tidak dapat berdiri sendiri, keempat elemen ini mempunyai hubungan yang cukup erat yaitu dengan mengamalkan nilai-nilai luhur **adat** dan **keagamaan** akan tercipta masyarakat yang cerdas sehingga terwujud pembangunan yang **maju** dalam segala aspek pembangunan dan merata pada seluruh lapisan masyarakat. Berikut keterkaitan antar elemen visi

Gambar 1.1
Keterkaitan Antar Elemen Visi



2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023, misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan sistem Pemerintah yang demokratis, aspiratif dan akuntabel demi tercapainya masyarakat yang sejahtera.
2. Melanjutkan percepatan pembangunan yang adil dan merata dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur pedesaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Meningkatkan pengelolaan pendidikan dan pelayanan kesehatan dengan percepatan pembangunan sarana dan prasarana pendukung agar lebih mudah dijangkau dalam rangka mencerdaskan masyarakat dan kemudahan akses kesehatan.
5. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan keagamaan dan pembangunan sarana dan prasarana penunjang peribadatan.
6. Meningkatkan pembinaan minat dan bakat generasi muda agar memiliki kemampuan yang lebih kompetitif.
7. Melanjutkan peningkatan kualitas Aparatur Pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan secara bertahap dan keberlanjutan guna mempersiapkan sumber daya manusia yang berdaya guna dan berdaya saing.
8. Meningkatkan kualitas dan keterampilan para tenaga kerja dengan meningkatkan keahlian dan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan secara intensif dan berkesinambungan.
9. Menciptakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi agar terciptanya sinkronisasi , sosialisasi, dan efektivitas pembangunan.
10. Melanjutkan kembali proses penataan ruang Kabupaten Padang Lawas Utara.
11. Optimalisasi pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan evaluasi pembangunan.
12. Menjaga iklim yang dinamis dan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan usaha-usaha kecil dan menengah serta penguatan pertumbuhan ekonomi daerah.
13. Menerapkan prinsip ekonomi kerakyatan yang berbasis pada sumber daya alam.
14. Optimalisasi pemanfaatan lahan-lahan tidur menjadi lahan produktif melalui regulasi dan kebijakan perangsangan berproduksi.

15. Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan dengan memperhatikan kesetaraan gender.

Tabel 1.7
Keterkaitan Visi dan Misi
Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019 – 2023

Visi	Pokok-Pokok Visi	Misi
Bersama Membangun Padang Lawas Utara Beriman, Cerdas, Maju Dan Beradat	Beriman	Misi 5: Meningkatkan pelaksanaan kegiatan keagamaan dan pembangunan sarana dan prasarana penunjang peribadatan
	Cerdas	Misi 4 : Meningkatkan pengelolaan pendidikan dan pelayanan kesehatan dengan percepatan pembangunan sarana dan prasarana pendukung agar lebih mudah dijangkau dalam rangka mencerdaskan masyarakat dan kemudahan akses kesehatan
		Misi 6: Meningkatkan pembinaan minat dan bakat generasi muda agar memiliki kemampuan yang lebih kompetitif
		Misi 7: Melanjutkan peningkatan kualitas aparatur pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan secara bertahap dan keberlanjutan guna mempersiapkan sumber daya manusia yang berdaya guna dan berdaya saing
		Misi 8: Meningkatkan kualitas dan keterampilan para tenaga kerja dengan meningkatkan keahlian dan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan secara intensif dan berkesinambungan
		Misi 11: Optimalisasi pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan evaluasi pembangunan

Visi	Pokok-Pokok Visi	Misi
	Maju	Misi 1: Mewujudkan sistem pemerintah yang demokratis, aspiratif dan akuntabel demi tercapainya masyarakat yang sejahtera
		Misi 2: Melanjutkan percepatan pembangunan yang adil dan merata dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
		Misi 3: Melanjutkan pembangunan infrastruktur pedesaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar
		Misi 9: Menciptakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi agar terciptanya sinkronisasi , sosialisasi, dan efektivitas pembangunan
		Misi 10: Melanjutkan kembali proses penataan ruang Kabupaten Padang Lawas Utara
		Misi 12: Menjaga iklim yang dinamis dan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan usaha-usaha kecil dan menengah serta penguatan pertumbuhan ekonomi daerah
		Misi 13: Menerapkan prinsip ekonomi kerakyatan yang berbasis pada sumber daya alam
	Beradat	Misi 14: Optimalisasi pemanfaatan lahan-lahan tidur menjadi lahan produktif melalui regulasi dan kebijakan perangsangan berproduksi
		Misi 15: Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan dengan memperhatikan kesetaraan gender

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan Pemerintah Daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Melalui arah kebijakan, diperoleh strategi melalui program-program yang saling terkait dan rasional dalam pendukung pencaian indikator dan target sasaran yang di tetapkan. Keberhasilan capaian suatu program mendukung atau memicu keberhasilan program lainnya.

Melalui rumusan arah kebijakan, diperoleh sarana untuk menghasilkan atau diperolehnya berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan agar dapat merangkai program-program prioritas yang *inherent*. Agar kebijakan dapat dijadikan pedoman dalam menentukan program prioritas yang tepat, kebijakan dibuat dalam empat perspektif sesuai strateginya. Setelah arah kebijakan dibuat, langkah selanjutnya adalah merumuskan program pembangunan daerah. Tahap ini penting dalam perumusan RPJMD karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk program prioritas. *Urgensi* lain juga karena perumusan program pembangunan daerah adalah inti dari perencanaan strategis itu sendiri yang mendefinisikan tujuan startegis dalam 5 (lima) tahun. Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Suatu program pembangunan daerah dapat berupa pernyataan yang disamakan atau minimal mengandung program bupati terpilih yang didalamnya berisi program prioritas yang bersifat strategis

Program prioritas bupati dirumuskan sesuai dengan janji bupati dan wakil bupati selama kampanye pemilihan kepala daerah dan disusun berdasarkan bidang urusan yang menjadi prioritas pertama dalam program pembangunan daerah selama lima tahun. Kemudian, janji bupati dan wakil bupati tersebut telah

dijabarkan kedalam visi, misi, tujuan dan sasaran (indikator dan target) pembangunan.

Untuk mencapai indikator target kinerja visi dan misi pada sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka strategi atau prioritas pembangunan menjadi sarana untuk mendapatkan rumusan tentang program prioritas yang akan diselenggarakan oleh perangkat daerah terkait. Program perangkat daerah di masing-masing prioritas pembangunan selanjutnya disebut program pembangunan daerah untuk menggambarkan capaian atau dukungannya secara langsung terhadap sasaran pembangunan daerah Kabupaten Padang Lawas Utara. Untuk mendapatkan rumusan program pembangunan daerah yang tepat pada masing-masing prioritas pembangunan maka dirumuskan arah kebijakan.

Rumusan arah kebijakan pembangunan daerah menjelaskan cara yang ditempuh untuk menerjemahkan strategi ke dalam rencana program prioritas pembangunan. kebijakan pembangunan memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Dengan berbagai faktor internal, eksternal dan dinamika politik yang sedang terjadi, pelaksanaan pembangunan daerah mengalami gejolak. Sehingga secara tidak langsung mempengaruhi hasil capaian pembangunan daerah. Menyikapi hal tersebut, maka perlu dilakukan penyesuaian kebijakan dengan kondisi dan tantangan pembangunan daerah Kabupaten Padang Lawas Utara. Dengan demikian, perlu adanya penajaman terhadap kebijakan dan program prioritas dalam rangka pencapaian misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang berpedoman kepada strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya maka disusun program-program pembangunan daerah Kabupaten Padang Lawas Utara untuk periode 2019-2023. Program-program berikut, dalam perumusannya dijabarkan langsung dari visi dan misi bupati namun tetap dalam koridor sebagai pendukung atau prasyarat tercapainya visi dan misi Renstra Perangkat Daerah, sebagaimana dapat dilihat pada tabel.



Tabel 1.8
Program Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara 2019 – 2023

VISI: BERSAMA MEMBANGUN PADANG LAWAS UTARA BERIMAN, CERDAS, MAJU DAN BERADAT													
MISI/TUJUAN	SASARAN	INDIKATO R SASARAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR PROGRAM	2021		2022		2023		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
M.1	MEWUJUDKAN SISTEM PEMERINTAH YANG DEMOKRATIS, ASPIRATIF DAN AKUNTABEL DEMI TERCAPAINYA MASYARAKAT YANG SEJAHTERA												
M.7	MELANJUTKAN PENINGKATAN KUALITAS APARATUR PEMERINTAH MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIH SECARA BERTAHAP DAN KEBERLANJUTAN GUNA MEMPERSIAPKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA GUNA DAN BERDAYA SAING												
M.11	OPTIMALISASI PELAKSANAAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI DALAM PROSES PERENCANAAN, PELAKSANAAN EVALUASI PEMBANGUNAN												
M.9	MENCIPTAKAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI AGAR TERCIPTANYA SINKRONISASI, SOSIALISASI, DAN EFEKTIVITAS PEMBANGUNAN												
Mewujudkan Sistem Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	indeks SPBE		928.751.656		720.735.619		505.072.863	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			2	Program Pencatatan Sipil	Persentase dokumen dalam pelayanan pencatatan sipil yang diterbitkan		403.712.348		212.178.059		171.662.662	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
			3	Program Pendaftaran Penduduk	persentase dokumen kependudukan yang diterbitkan		288.365.963		262.811.459		225.307.244		
			4	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Aparatur yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis		1.811.513.623		2.055.694.182		1.444.673.017	BKPSDM	
			5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota		12.561.751.231		10.740.689.245		10.278.278.282	Sekretariat Daerah	
			6	Program Pengelolaan Pendidikan	Indeks Pelayanan Publik		56.984.050.067		50.179.778.825		44.627.500.479	DINAS PENDIDIKAN	
			7	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			82.626.038.932		73.455.953.750		66.679.949.823	DINAS KESEHATAN/ RSUD	
			8	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			146.473.081		95.742.438		193.156.847	DPMPTSP	



VISI: BERSAMA MEMBANGUN PADANG LAWAS UTARA BERIMAN, CERDAS, MAJU DAN BERADAT

MISI/TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR PROGRAM	2021		2022		2023		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Indeks Presepsi Korupsi	9	Program penyelenggaraan pengawasan	Persentase tindak lanjut temuan		2.336.099.104		2.426.923.223		1.569.328.356	INSPEKTORAT	
			10	Program pengelolaan keuangan daerah	Opini laporan keuangan		13.192.250.582		12.174.889.365		10.174.077.884	BPKPD	
			11	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Aparatur yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis		1.811.513.623		2.055.694.182		1.444.673.017	BKPSDM	
	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Predikat Akuntabilitas Kinerja	12	Program perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi	Persentase program reformasi birokrasi yang terlaksana		302.606.279		319.167.535		207.719.631	INSPEKTORAT	
			13	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	persentase pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah		1.933.820.880		2.305.708.144		1.872.131.602	BAPELITBANG	
			14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota		12561751231		10740689245		10278278282	Sekretariat Daerah	
TOTAL							187.888.698.599		167.746.655.271		149.671.809.988		
M.4	MENINGKATKAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN DENGAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG AGAR LEBIH MUDAH DIJANGKAU DALAM RANGKA MENCERDASKAN MASYARAKAT DAN KEMUDAHAN AKSES KESEHATAN												
M.15	MENINGKATKAN PERAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN DENGAN MEMPERHATIKAN KESETARAAN GENDER												
M.6	MENINGKATKAN PEMBINAAN MINAT DAN BAKAT GENERASI MUDA AGAR MEMILIKI KEMAMPUAN YANG LEBIH KOMPETITIF												
M.8	MENINGKATKAN KUALITAS DAN KETERAMPILAN PARA TENAGA KERJA DENGAN MENINGKATKAN KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN TENAGA KERJA MELALUI PELATIHAN SECARA INTENSIF DAN BERKESINAMBUNGAN												
Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	Meningkatnya derajat pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah	15	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Murni SD/MI/SDLB		56.984.050.067		50.179.778.825		44.627.500.479	DINAS PENDIDIKAN	
					Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/SMP LB								
					Persentase keterisian Data Pokok								



VISI: BERSAMA MEMBANGUN PADANG LAWAS UTARA BERIMAN, CERDAS, MAJU DAN BERADAT

MISI/TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	2021		2022		2023		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
				Pendidikan Perubahan RPJMD 2019-2023 Kabupaten Padang Lawas Utara 33 Angka Kelulusan paket b dan c								
			16	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	978.498.176						
			17	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Peningkatan Mutu Pendidikan	291.628.22		222.619.561		221.242.052	DINAS PENDIDIKAN	
			18	Program pembinaan perpustakaan	Indeks pembangunan literasi masyarakat	1.327.317.175		1.073.341.273		957.402.558	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			19	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Anak	174.534.951		110.054.941		190.524.383	DPPPAPPKB	
			20	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Anak Sekolah	82.626.038.932		73.455.953.750		66.679.949.823	DINAS KESKATAN	
			21	Program Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Infrastruktur Pendukung Pendidikan	78.011.578.813		62.314.093.978		57.265.948.737	DINAS PUTR	
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	22	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan fasilitas kesehatan rujukan yang terstandar	82.626.038.932		73.455.953.750		66.679.949.823	DINAS KESEHATAN	
					Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan							
					Rasio Puskesmas dan							



VISI: BERSAMA MEMBANGUN PADANG LAWAS UTARA BERIMAN, CERDAS, MAJU DAN BERADAT

MISI/TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	2021		2022		2023		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
				Pustu dalam kondisi baik								
				Persentase Balita Gizi Buruk								
				Rata-rata Lama Sakit								
			23	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Pemenuhan Ketersediaan alat kesehatan dan Makan minum	149.332.957		734.312.470		666.575.221		
			24	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Aparatur yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis	1.811.513.623		2.055.694.182		1.444.673.017	BKPSDM	
			25	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase Pembinaan Keluarga Berencana	6.714.342.299		5.005.048.263		4.766.452.556	DPPPAPPKB	
			26	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor PPH	534.132.827		302.422.836		565.582.239	DINAS KETAHANAN PANGAN	
			27	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Volume Air yang Disalurkan (M3)	4.969.607.517		4.505.689.288		4.085.106.472	DINAS PUTR	
	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	28	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender	399.537.841		321.430.303		304.839.013	DPPPAPPKB	
			29	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN	Peningkatan Porsi Keterlibatan Perempuan Dalam Partai Politik	174.969.456		211.866.446		227.895.053	KESBANGPOL	



VISI: BERSAMA MEMBANGUN PADANG LAWAS UTARA BERIMAN, CERDAS, MAJU DAN BERADAT

MISI/TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR PROGRAM	2021		2022		2023		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
				ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK									
	Meningkatkan jumlah tenaga kerja terampil	Tingkat pengangguran terbuka	30	Program Pengembangan UMKM	1. penumbuhan wirausaha baru 2. Peningkatan Kualitas dan ragam Produk KUKM. 3. Aparatur yang dilatih		70.716.072		48.790.148		119.532.902	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN	
			31	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	terpenuhi pencari kerja yang produktif		126.458.728		212.902.464		195.071.055	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN	
			32	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase IKM yang dibina		1.665.771.197		837.996.989		801.174.328	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
TOTAL							319.636.067.790		275.047.949.469		249.799.419.712		
M.12	MENJAGA IKLIM YANG DINAMIS DAN KONDUSIF BAGI PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN USAHA-USAHAAN KECIL DAN MENENGAH SERTA PENGUATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH												
M.13	MENERAPKAN PRINSIP EKONOMI KERAKYATAN YANG BERBASIS PADA SUMBER DAYA ALAM												
M.14	OPTIMALISASI PEMANFAATAN LAHAN-LAHAN TIDUR MENJADI LAHAN PRODUKTIF MELALUI REGULASI DAN KEBIJAKAN PERANGSANGAN BERPRODUKSI												
Mewujudkan perekonomian masyarakat yang maju	Meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat	Indeks Gini, Tingkat Kemiskinan	33	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Jumlah Pasar Yang Dibangun/Rehabilitasi		5.535.833.521		2.942.402.442		2.425.774.425	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			34	Program penyediaan dan pengembangan Prasarana pertanian	Produksi padi (ton)		1.368.801.040		1.832.756.834		1.596.025.872	DINAS PERTANIAN	
					Luas lahan sawah produktif (ha)							DINAS PERTANIAN	
			35	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Rasio kelompok ternak yang menggunakan teknologi peternakan		500.952.573		922.675.079		1.015.918.055	DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
					Jumlah nilai produk peternakan yang diekspor keluar wilayah							DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	



VISI: BERSAMA MEMBANGUN PADANG LAWAS UTARA BERIMAN, CERDAS, MAJU DAN BERADAT

MISI/TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR R SASARAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR PROGRAM	2021		2022		2023		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			36	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Jumlah nilai produk perikanan yang diekspor keluar wilayah		175.620.901		222.774.390		187.118.353	DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			37	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase koperasi aktif		12.883.552		25.725.714		24.072.598	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN	
			38	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			70.235.380		64.383.618		81.172.910	DINAS SOSIAL	
	Meningkatnya sektor kepariwisataan daerah	Indeks Kepuasan Wisatawan	39	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase tempat wisata yang dikelola		747.418.085		731.555.512		1.089.238.849	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			40	Program pengembangan kebudayaan	Persentase pelaku seni budaya yang dibina		457.170.713		455.177.907		463.153.263	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			41	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase peserta/ pelaku wisata yang dibina		49.043.181		32.477.128		48.356.343	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			42	Program Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan Infrastruktur Pariwisata		78.011.578.813		62.314.093.978		57.265.948.737	DINAS PUTR	
			43	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang			1.165.179.903		2.568.357.304		2.236.848.897	DINAS PUTR	
			44	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)			11.551.459.931		8.784.461.531		8.091.103.424	DINAS PERKIM	
			45	Program Pengelolaan Persampahan	Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Persampahan		1.792.949.980		1.444.786.266		1.771.196.914	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	Meningkatnya investasi dalam rangka	Tingkat Perumbuhan Investasi	46	Program pengembangan iklim penanaman modal	Program pengembangan iklim		136.453.750		145.608.292		309.934.679	DPMPTSP	



VISI: BERSAMA MEMBANGUN PADANG LAWAS UTARA BERIMAN, CERDAS, MAJU DAN BERADAT

MISI/TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	2021		2022		2023		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
					TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	percepatan pembangunan daerah			penanaman modal								
			47	Program pelayanan penanaman modal		146.473.081		95.742.438		193.156.847	DPMPTSP	
			48	Program Penyelenggaraan Jalan		78.011.578.813		62.314.093.978		57.265.948.737	DINAS PUTR	
			49	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		11.551.459.931		8.784.461.531		8.091.103.424	DINAS PERKIM	
			50	Program Perekonomian dan Pembangunan		2.002.281.830		1.706.741.113		1.468.809.913	Sekretariat Daerah	
TOTAL						193.287.374.978		155.388.275.055		143.624.882.241		
M.3	MELANJUTKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN TARAF HIDUP MASYARAKAT DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR											
M.5	MENINGKATKAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEAGAMAAN DAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG PERIBADATAN											
M.10	MELANJUTKAN KEMBALI PROSES PENATAAN RUANG KAB.PALUTA											
M.2	MELANJUTKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN YANG ADIL DAN MERATA DENGAN MEMPERHATIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN											
Meningkatkan infrastruktur pembangunan wilayah yang merata, berkelanjutan, dan sesuai tata ruang daerah	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar	Cakupan Aksesibilitas Antar Wilayah	51	Program penyelenggaraan jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	83.531.173.565		70.229.770.281		78.193.792.946	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
	Meningkatkan kepatuhan dalam pemanfaatan ruang sesuai RTRW dan RDTR	Persentase kepatuhan terhadap RTRW dan RDTR	52	Program penyelenggaraan Penataan Ruang	Rasio Ruang Terbuka Hijau	1.165.179.903		2.568.357.304		2.236.848.897	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	
			53	Program Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum	5.919.559.419		4.683.057.142		4.220.442.833	SATPOL PP	
			54	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Peningkatan Kepatuhan Perijinan Terhadap RTRW	157.446.634		138.427.609		271.429.556	DPMPTSP	
	Meningkatnya pembangunan Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	55	Program pengendalian pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota	IKLH	237.234.776		288.530.330		318.076.280	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	



VISI: BERSAMA MEMBANGUN PADANG LAWAS UTARA BERIMAN, CERDAS, MAJU DAN BERADAT													
MISI/TUJUAN	SASARAN	INDIKATO R SASARAN	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR PROGRAM	2021		2022		2023		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
			56	PROGRAM PENYELENGGARAA N LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pengendalian Emisi Udara		2.083.346.330		3.280.516.479		2.648.196.755	DINAS PERHUBUNGA N	
TOTAL							93.093.940.627		81.188.659.145		87.888.787.266		

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Arah kebijakan pada tahun 2023, pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara menitikberatkan pada investasi dan perekonomian yang maju, tata kelola pemerintahan yang profesional dan kondusifitas daerah yang baik dengan tetap memprioritaskan pemulihan ekonomi dan kesehatan masyarakat sebagai dampak dari pandemi covid-19. Berdasarkan hal tersebut maka tema pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2023 adalah : **"PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT MELALUI TRANSFORMASI EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN MENUJU PADANG LAWAS UTARA SEJAHTERA"**.

Sesuai tema pembangunan tahun 2023, pembangunan Padang Lawas Utara dilakukan pada beberapa aspek kehidupan masyarakat. Dengan capaian pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya, maka pada tahun ini diharapkan Kabupaten Padang Lawas Utara mampu meningkatkan daya saing pada beberapa aspek. Tahun 2023, terdapat fokus pembangunan yang diarahkan kepada :

1. Peningkatan perekonomian masyarakat;
2. Peningkatan kesehatan masyarakat;
3. Peningkatan perlindungan perempuan dan anak;
4. Pengembangan kawasan industri kecil dan menengah;
5. Peningkatan nilai tambah hasil pertanian (dalam arti luas) unggulan daerah;
6. Peningkatan daya dukung daerah dalam menciptakan peluang investasi;
7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

a. Dasar Pertimbangan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual

sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, menyebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan Sosial.

Standar Pelayanan minimal diselenggarakan dan diterapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Teknis yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian. Dari keenam Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, berikut adalah dasar hukum dari keenam urusan tersebut.

1. Untuk Urusan Pendidikan dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
2. Untuk Urusan Kesehatan dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penerapan Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
3. Untuk Urusan Pekerjaan Umum dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

4. Untuk Urusan Perumahan Rakyat dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
5. Untuk Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
6. Untuk Urusan Sosial dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Di daerah Kabupaten/Kota. Pada pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Padang Lawas Utara, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu tujuan utama perwujudan kesejahteraan masyarakat yang adil, makmur dan berkesinambungan. Dalam kerangka untuk mengimplementasikan pelayanan tersebut, pemerintah daerah harus berupaya untuk memberikan pelayanan prima sesuai dengan standar pelayanan minimal yang sudah ditetapkan pada masing-masing bidang urusan pemerintahan oleh kementerian/lembaga negara masing-masing dengan menyesuaikan anggaran dan mengoptimalkan setiap potensi sumber daya di Kabupaten Padang Lawas Utara.

b. Kebijakan Umum Daerah

Dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah. SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kabupaten Kabupaten Padang Lawas Utara untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan/Keputusan Menteri. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki tema pembangunan sebagaimana yang dirumuskan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023, yaitu :

***"PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT
MELALUI TRANSFORMASI EKONOMI YANG INKLUSIF DAN
BERKELANJUTAN MENUJU PADANG LAWAS UTARA SEJAHTERA"***

Sesuai dengan tema pembangunan tahun 2023, pembangunan Padang Lawas Utara dilakukan pada beberapa aspek kehidupan masyarakat. Dengan capaian pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya, maka pada tahun ini diharapkan Kabupaten Padang Lawas Utara mampu meningkatkan daya saing pada beberapa aspek. Dalam rangka menjaga kesinambungan Perubahan RKPD dengan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2023, maka prioritas daerah Kabupaten Padang Lawas Utara adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi pengawasan dan pengendalian internal Pemerintah Daerah;
2. Implementasi pelaksanaan E-Government di lingkungan Pemerintah;
3. Peningkatan pola hidup sehat masyarakat;

4. Optimalisasi pemberdayaan perempuan dan pemuda;
5. Melanjutkan pengembangan destinasi wisata;
6. Peningkatan produktivitas angkatan kerja;
7. Peningkatan kesejahteraan petani dan pekebun; dan
8. Peningkatan kualitas koperasi, UMKM, dan IKM.

Dengan mencermati dan memahami prioritas dan tema pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2023 maka arah kebijakan yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.9

Keterkaitan Misi/ Tujuan/ Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Tahapan Pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023

MISI/ TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHUN 2023
Misi 1: Mewujudkan Sistem Pemerintah Yang Demokratis, Aspiratif Dan Akuntabel Demi Tercapainya Masyarakat Yang Sejahtera			
Misi 7: Melanjutkan Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintah Melalui Pendidikan Dan Pelatihan Secara Bertahap Dan Keberlanjutan Guna Mempersiapkan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Guna Dan Berdaya Saing			
Misi 11: Optimalisasi Pelaksanaan Koordinasi Dan Sinkronisasi Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan			
Misi 9: Menciptakan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Agar Terciptanya Sinkronisasi, Sosialisasi, Dan Efektivitas Pembangunan			
Tujuan : Mewujudkan Sistem Pemerintahan yang Baik dan Bersih			
Terwujudnya Peningkatan kualitas pelayanan publik	Penerapan Reformasi Birokrasi	Implementasi pelaksanaan E Government di Lingkungan pemerintah	
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN		Optimalisasi pengawasan dan pengendalian internal pemerintah daerah	
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi			



MISI/ TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHUN 2023
Misi 4: Meningkatkan Pengelolaan Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan Dengan Percepatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pendukung Agar Lebih Mudah Dijangkau Dalam Rangka Mencerdaskan Masyarakat Dan Kemudahan Akses Kesehatan			
Misi 15: Meningkatkan Peran Dan Partisipasi Masyarakat Dan Pemberdayaan Dengan Memperhatikan Kesetaraan Gender			
Misi 6: Meningkatkan Pembinaan Minat Dan Bakat Generasi Muda Agar Memiliki Kemampuan Yang Lebih Kompetitif			
Misi 8: Meningkatkan Kualitas Dan Keterampilan Para Tenaga Kerja Dengan Meningkatkan Keahlian Dan Keterampilan Tenaga Kerja Melalui Pelatihan Secara Intensif Dan Berkesinambungan			
Tujuan 2: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat			
Meningkatnya derajat pendidikan	Peningkatan kualitas daya saing SDM	Pemerataan pendistribusian tenaga pendidik dan kependidikan	
		Peningkatan kualitas manajemen pendidikan	
Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat		Pemenuhan kebutuhan penanganan covid-19	
		Penanganan dampak covid-19	
		Rehabilitasi dampak pandemi covid-19	
		Penanganan pola hidup sehat masyarakat	
		Peningkatan kesehatan masyarakat	Peningkatan Kesehatan masyarakat
Meningkatnya partisipasi Perempuan dalam pembangunan		Optimalisasi pemberdayaan perempuan dan pemuda	
		Peningkatan perlindungan perempuan dan anak	Peningkatan perlindungan perempuan dan anak



MISI/ TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHUN 2023
Meningkatkan jumlah tenaga kerja terampil		Peningkatan peluang dan kesempatan kerja terdidik dan terampil	
		Peningkatan kualitas kompetensi tenaga kerja	
		Peningkatan produktivitas angkatan kerja	
Misi 12 : Menjaga Iklim Yang Dinamis Dan Kondusif Bagi Pertumbuhan Dan Perkembangan Usaha - Usahaan Kecil Dan Menengah Serta Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah			
Misi 13 : Menerapkan Prinsip Ekonomi Kerakyatan Yang Berbasis Pada Sumber Daya Alam			
Misi 14 : Optimalisasi Pemanfaatan Lahan-Lahan Tidur Menjadi Lahan Produktif Melalui Regulasi Dan Kebijakan Perangsangan Berproduksi			
Tujuan 3 : Mewujudkan perekonomian masyarakat yang maju			
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Penanggulangan Kemiskinan	Peningkatan perekonomian masyarakat	Peningkatan Perekonomian masyarakat
		Peningkatan pemberdayaan koperasi dan UMKM	
		Peningkatan kesejahteraan petani dan pekebun	
		Peningkatan kualitas koperasi, UMKM dan IKM	
		Pengembangan kawasan industri kecil dan menengah	Pengembangan kawasan industri kecil dan menengah
		Peningkatan nilai tambah hasil pertanian (dalam arti luas) unggulan daerah	Peningkatan nilai tambah hasil pertanian (dalam arti luas) unggulan daerah

MISI/ TUJUAN/ SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHUN 2023
Meningkatnya pertumbuhan kepariwisataan daerah	Pengembangan produktivitas produk unggulan daerah	Pengembangan pengelolaan daerah destinasi wisata	
		Melanjutkan pengembangan destinasi wisata	
Meningkatnya investasi dalam rangka percepatan pembangunan daerah		Peningkatan daya dukung daerah dalam menciptakan peluang investasi	Peningkatan daya dukung daerah dalam menciptakan peluang investasi
Misi 3 : Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Dalam Rangka Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar			
Misi 5 : Meningkatkan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Dan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Penunjang Peribadatan			
Misi 10: Melanjutkan Kembali Proses Penataan Ruang Kabupaten Padang Lawas Utara			
Misi 2 : Melanjutkan Percepatan Pembangunan Yang Adil Dan Merata Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan			
Tujuan 4: Mewujudkan Keberlanjutan Pembangunan Infrastruktur			
Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar	Pemenuhan infrastruktur dasar wilayah yang terpadu dan berkelanjutan		
Meningkatkan kepatuhan dalam pemanfaatan ruang sesuai RTRW dan RDTR			
Meningkatkatnya Pembangunan Berkelanjutan		Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup

BAB II**CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH****2.1. Capaian Kinerja Makro**

Capaian Kinerja Makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian Kinerja Makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Tabel 2.1
Indikator Capaian Kinerja Makro
Kabupaten Padang Lawas Utara TA. 2023

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	72,77	73,45	0,68
2	Angka Kemiskinan	8,94	8,79	- 0,15
3	Angka Pengangguran	4,31	4,42	0,11
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,12	4,92	0,80
5	Pendapatan Perkapita	Rp. 10.447.000	Rp. 10.615.000	168.000
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)	0,245	0,241	- 0,004

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian Kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan Capaian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023 memuat data informasi kinerja setiap urusan

pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)
Kabupaten Padang Lawas Utara TA. 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar					
1.	Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	143	Dinas Pendidikan	
		Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	3.285	Dinas Pendidikan	
		Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	60	Dinas Pendidikan	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	437	Dinas Pendidikan	
		Jumlah pendidik pada PAUD	502	Dinas Pendidikan	
		Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	209	Dinas Pendidikan	
		Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pem	146	Dinas Pendidikan	
		Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	271	Dinas Pendidikan	
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima	36.492	Dinas Pendidikan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
		perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah			
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	16.972	Dinas Pendidikan	
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	31.535	Dinas Pendidikan	
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	5.093	Dinas Pendidikan	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	2.967	Dinas Pendidikan	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	1.375	Dinas Pendidikan	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	2.876	Dinas Pendidikan	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	1.343	Dinas Pendidikan	
		jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	753	Dinas Pendidikan	
		jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	285	Dinas Pendidikan	
		jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	331	Dinas Pendidikan	
		jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	121	Dinas Pendidikan	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	2.336	Dinas Pendidikan	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	755	Dinas Pendidikan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	250	Dinas Pendidikan	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	93	Dinas Pendidikan	
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	304	Dinas Pendidikan	
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	56	Dinas Pendidikan	
		Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	10	Dinas Pendidikan	
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	487	Dinas Pendidikan	
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	241	Dinas Pendidikan	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	98	Dinas Pendidikan	
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	93	Dinas Pendidikan	
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	54	Dinas Pendidikan	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	250	Dinas Pendidikan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
		Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	9	Dinas Pendidikan	
2.	Kesehatan	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	1	Dinas Kesehatan Dan RSUD	
		Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	1	Dinas Kesehatan Dan RSUD	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	5	Dinas Kesehatan Dan RSUD	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	1.115	Dinas Kesehatan Dan RSUD	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3	Dinas Kesehatan Dan RSUD	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	1.115	Dinas Kesehatan Dan RSUD	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	6	Dinas Kesehatan Dan RSUD	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	1.115	Dinas Kesehatan Dan RSUD	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	9	Dinas Kesehatan Dan RSUD	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	1.225	Dinas Kesehatan Dan RSUD	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	5	Dinas Kesehatan Dan RSUD	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	1.224	Dinas Kesehatan Dan RSUD	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3	Dinas Kesehatan Dan RSUD	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1.249	Dinas Kesehatan Dan RSUD	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3	Dinas Kesehatan Dan RSUD	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1.249	Dinas Kesehatan Dan RSUD	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3	Dinas Kesehatan Dan RSUD	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1.219	Dinas Kesehatan Dan RSUD	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3	Dinas Kesehatan Dan RSUD	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1.231	Dinas Kesehatan Dan RSUD	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	4	Dinas Kesehatan Dan RSUD	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	34	Dinas Kesehatan Dan RSUD	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	7	Dinas Kesehatan Dan RSUD	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	369	Dinas Kesehatan Dan RSUD	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	4	Dinas Kesehatan Dan RSUD	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1.178	Dinas Kesehatan Dan RSUD	
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	19,4	Dinas PUTR	
		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	187,85	Dinas PUTR	
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)	0	Dinas PUTR	
		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)	0	Dinas PUTR	
		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota	86,88	Dinas PUTR	
		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	73,62	Dinas PUTR	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	0	Dinas PUTR	
		Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	196,50	Dinas PUTR	
		Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	3.998,5	Dinas PUTR	
		Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	140	Dinas PUTR	
		Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak)	0	Dinas PUTR	
		Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)	0	Dinas PUTR	
		Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)	1	Dinas PUTR	
		Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM	0	Dinas PUTR	
		Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.	0	Dinas PUTR	
		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	666	Dinas PUTR	
		Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	0	Dinas PUTR	
		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	0	Dinas PUTR	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	0	Dinas PUTR	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	0	Dinas PUTR	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	0	Dinas PUTR	
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	666	Dinas PUTR	
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	0	Dinas PUTR	
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	0	Dinas PUTR	
		Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	0	Dinas PUTR	
		Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	0	Dinas PUTR	
		Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	0	Dinas PUTR	
		Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	0	Dinas PUTR	
		Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	0	Dinas PUTR	
		Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	0	Dinas PUTR	
		Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	44	Dinas PUTR	
		Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	Ada	Dinas PUTR	
		Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	Ada	Dinas PUTR	
		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	0	Dinas PUTR	
		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	0	Dinas PUTR	
		Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	6.889	Dinas PUTR	
		Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	6.889	Dinas PUTR	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
		Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	1.190,81	Dinas PUTR	
		Panjang jalan yang dibangun	6.921,50	Dinas PUTR	
		Panjang jembatan yang dibangun	28,20	Dinas PUTR	
		Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	5.627,50	Dinas PUTR	
		Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	0	Dinas PUTR	
		Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi	3.038,40	Dinas PUTR	
		Panjang jembatan yang direhabilitasi	16	Dinas PUTR	
		Panjang jalan yang dipelihara	1.184	Dinas PUTR	
		Panjang jembatan yang dipelihara	108	Dinas PUTR	
		Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	0	Dinas PUTR	
		Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	30	Dinas PUTR	
		Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	30	Dinas PUTR	
		Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	0	Dinas PUTR	
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	Ada	Dinas PUTR	
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	0	Dinas PUTR	
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	0	Dinas PUTR	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
		Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	0	Dinas PUTR	
		Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	Ada	Dinas PUTR	
		Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya	0	Dinas PUTR	
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	Ada	Dinas PUTR	
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	30	Dinas PUTR	
		Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	0	Dinas PUTR	
		Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	Dinas PUTR	
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi	0	Dinas PUTR	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
		usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			
		Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas PUTR	
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas PUTR	
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	0	Dinas PUTR	
		Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	0	Dinas PUTR	
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	0	Dinas PUTR	
		Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	36	Dinas PUTR	
		Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	Dinas PUTR	
		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas PUTR	
		Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas PUTR	
		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar	0	Dinas PUTR	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
		jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			
4.	Perumahan Rakyat	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	139	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	
		Jumlah rumah yang terkena bencana alam	0	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	0	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	0	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	
		Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	0	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	
		Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan	582	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
		rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM			
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	
		Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	
		Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	33,03	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	
		Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	432	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	
		Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	109,80	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	
		Jumlah rumah di kab/kota	56.120	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	
		Jumlah unit PK RTLH	432	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	
		Jumlah rumah tidak layak huni	2.371	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	
		Jumlah rumah yang tidak dihuni	0	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	
		Rasio rumah dan KK	92,91	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	
		Jumlah rumah pembangunan baru	150	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	
		Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	5	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	
		Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	0	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	0	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	0	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	
		Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	0	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	0	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	
		Jumlah pengembang yang tersertifikasi	5	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	
		Jumlah pengembang yang terregistrasi	5	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	
		Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	23	Satuan Polisi Pamong Praja	
		Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	3.449	Satuan Polisi Pamong Praja	
		Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	26	Satuan Polisi Pamong Praja	
		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	2	Satuan Polisi Pamong Praja	
		Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	8	Satuan Polisi Pamong Praja	
		Tersedianya sarana prasarana minimal	166	Satuan Polisi Pamong Praja	
		Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	80%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	202 desa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	10%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	474	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		Persentase warga negara yang ikut pelatihan	474	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	2	Satuan Polisi Pamong Praja	
		Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	2	Satuan Polisi Pamong Praja	
		Tersedianya aparaturnya selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	20	Satuan Polisi Pamong Praja	
		Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	2	Satuan Polisi Pamong Praja	
		Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	118	Satuan Polisi Pamong Praja	
		Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	54	Satuan Polisi Pamong Praja	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
		Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	32	Satuan Polisi Pamong Praja	
		Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	127	Satuan Polisi Pamong Praja	
6.	Sosial	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	13	Dinas Sosial	
		Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	0	Dinas Sosial	
		Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	0	Dinas Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	50	Dinas Sosial	
		Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	0	Dinas Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	110	Dinas Sosial	
		Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	0	Dinas Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	0	Dinas Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	7	Dinas Sosial	
		Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	0	Dinas Sosial	
		Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	0	Dinas Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut	0	Dinas Sosial	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
		usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan			
		Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0	Dinas Sosial	
		Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	1	Dinas Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	75	Dinas Sosial	
		Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	0	Dinas Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	0	Dinas Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	0	Dinas Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	0	Dinas Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	0	Dinas Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	0	Dinas Sosial	
		Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	20	Dinas Sosial	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
		Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	2	Dinas Sosial	
		Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	2	Dinas Sosial	
		Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	0	Dinas Sosial	
		Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	20	Dinas Sosial	
		Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	87	Dinas Sosial	
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar					
7.	Tenaga Kerja	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	0	Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan	
		Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.	0	Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan	
		Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota.	0	Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan	
		Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster		Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan	
		Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	1	Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan	
		Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	2	Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan	
		Persentase LPK yang terakreditasi	14	Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan	
		Persentase LPK yang memiliki perizinan	14	Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan	
		Jumlah penganggur yang dilatih	56	Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan	
		Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	56	Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan	
		Persentase penyerapan lulusan		Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan	
		Lulusan bersertifikat kompetensi	48	Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	43	Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
		Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	43	Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan	
		Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	51	Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan	
		Data tingkat produktivitas total	51	Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan	
		Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	2	Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan	
		Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	2	Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan	
		Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	2	Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan	
		Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.	0	Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan	
		Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	51	Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan	
		Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	0	Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan	
		Jumlah mogok kerja	0	Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan	
		Jumlah penutupan perusahaan	0	Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan	
		Jumlah perselisihan kepentingan	0	Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan	
		Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	1	Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan	
		Jumlah perselisihan PHK	0	Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan	
		Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	1.443	Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan	
		Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	0	Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
		Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	0	Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan	
		Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	0	Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan	
		Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	0	Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan	
		Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	105	Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan	
		Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	0	Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan	
		Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	0	Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan	
		Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	2	Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan	
		Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	0	Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan	
		Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota.	0	Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan	
		Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	1	Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	0	Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	0	Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	0	Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang	0	Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
		mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja			
		Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	0	Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan	
		Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	0	Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan	
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	36	Dinas P2PAP2KB	
		Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	10	Dinas P2PAP2KB	
		Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	2	Dinas P2PAP2KB	
		Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	1	Dinas P2PAP2KB	
		Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	80	Dinas P2PAP2KB	
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	2	Dinas P2PAP2KB	
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	2	Dinas P2PAP2KB	
		Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	2	Dinas P2PAP2KB	
		Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	48	Dinas P2PAP2KB	
		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	1	Dinas P2PAP2KB	
		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan	1	Dinas P2PAP2KB	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
		keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota			
		Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1	Dinas P2PAP2KB	
		Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	0	Dinas P2PAP2KB	
		Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100	Dinas P2PAP2KB	
9.	Pangan	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	2	Dinas Ketapang	
		Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	1	Dinas Ketapang	
		Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	1	Dinas Ketapang	
		Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	1	Dinas Ketapang	
		Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	1	Dinas Ketapang	
		Tertanganinya kerawanan pangan	23	Dinas Ketapang	
		Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	2.780 Kg	Dinas Ketapang	
		Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	82,15%	Dinas Ketapang	
10.	Pertanahan	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	0	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	
		SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	0	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	
		SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi	0	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
		Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.			
		Dokumen Izin membuka tanah	0	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	
		Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	0	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	
11.	Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks kualitas air (IKA)	70	Dinas Lingkungan Hidup	
		Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks Kualitas Udara (IKU)	94,09	Dinas Lingkungan Hidup	
		Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks tutupan hutan (ITH)	35,57	Dinas Lingkungan Hidup	
		Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	18	Dinas Lingkungan Hidup	
		Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	22	Dinas Lingkungan Hidup	
		Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	100	Dinas Lingkungan Hidup	
		Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota	0	Dinas Lingkungan Hidup	
		Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	0	Dinas Lingkungan Hidup	
		Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah	0	Dinas Lingkungan Hidup	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
		kabupaten/kota yang ditangani. Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkung			
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penerbitan akta perkawinan	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
		Penerbitan akta perceraian	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
		Penerbitan akta kematian	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
		Penyajian data kependudukan	0	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
13.	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	386	Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa	
		Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	0	Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	386	Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa	
		Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	386	Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa	
14.	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	1	Dinas P2PAP2KB	
		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	23,70	Dinas P2PAP2KB	
		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	4,86	Dinas P2PAP2KB	
		Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	74,51	Dinas P2PAP2KB	
		Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja	27	Dinas P2PAP2KB	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
		(termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK			
		Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100	Dinas P2PAP2KB	
		Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	19,30	Dinas P2PAP2KB	
		Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	224	Dinas P2PAP2KB	
		Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	28	Dinas P2PAP2KB	
		Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah		Dinas P2PAP2KB	
		Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	16,27	Dinas P2PAP2KB	
15.	Perhubungan	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	0	Dinas Perhubungan	
		Terlaksananya pelayanan uji berkala	0	Dinas Perhubungan	
		Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	0	Dinas Perhubungan	
		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	100	Dinas Perhubungan	
16.	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	7	Dinas Komunikasi dan informatika	
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	7	Dinas Komunikasi dan informatika	
		Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah	100	Dinas Komunikasi dan informatika	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
		yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah			
		Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	16,7	Dinas Komunikasi dan informatika	
		Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	54	Dinas Komunikasi dan informatika	
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	26,6	Dinas Komunikasi dan informatika	
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	77	Dinas Komunikasi dan informatika	
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	77	Dinas Komunikasi dan informatika	
		Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	54	Dinas Komunikasi dan informatika	
		Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	54	Dinas Komunikasi dan informatika	
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	54	Dinas Komunikasi dan informatika	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
		Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	54	Dinas Komunikasi dan informatika	
		Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	54	Dinas Komunikasi dan informatika	
		Persentase data yang dapat berbagi pakai	51	Dinas Komunikasi dan informatika	
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	10	Dinas Komunikasi dan informatika	
		Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	100	Dinas Komunikasi dan informatika	
		Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	100	Dinas Komunikasi dan informatika	
		Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	100	Dinas Komunikasi dan informatika	
		Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100	Dinas Komunikasi dan informatika	
		Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100	Dinas Komunikasi dan informatika	
17.	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan	
		Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantudan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah	0	Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
		keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			
		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	32	Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan	
		Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	4	Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan	
		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	19	Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan	
		Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	46	Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan	
		Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	0	Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan	
		Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	44	Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	6	Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan	
		Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	6	Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan	
		Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	36,79	Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	0,79	Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan	
		Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	32,09	Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	0	Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0,86	Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan	
		Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	1,69	Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	1,22	Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan	
18.	Penanaman Modal	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	1	Dinas Pemod PTSP	
		Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	1	Dinas Pemod PTSP	
		Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	1	Dinas Pemod PTSP	
		Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	1	Dinas Pemod PTSP	
		Kegiatan pameran penanaman modal	1	Dinas Pemod PTSP	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
		Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	1	Dinas Pemod PTSP	
		Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	1	Dinas Pemod PTSP	
		Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	81	Dinas Pemod PTSP	
		Laporan realisasi penanaman modal	5	Dinas Pemod PTSP	
		Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	1	Dinas Pemod PTSP	
		Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	1	Dinas Pemod PTSP	
		Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota	1540	Dinas Pemod PTSP	
19.	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	56	Dinas Pemuda Dan Olahraga	
		Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	56	Dinas Pemuda Dan Olahraga	
		Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda	0	Dinas Pemuda Dan Olahraga	
		Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	0	Dinas Pemuda Dan Olahraga	
		Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	35	Dinas Pemuda Dan Olahraga	
		Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	0	Dinas Pemuda Dan Olahraga	
20.	Statistik	Tersedianya buku profil daerah	1	Dinas Komunikasi dan informatika	
		Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	5	Dinas Komunikasi dan informatika	
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	5	Dinas Komunikasi dan informatika	
		Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	5	Dinas Komunikasi dan informatika	
		Jumlah kompilasi stastik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	5	Dinas Komunikasi dan informatika	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
		Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	16	Dinas Komunikasi dan informatika	
		Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	0	Dinas Komunikasi dan informatika	
21.	Persandian	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	0	Dinas Komunikasi dan informatika	
		Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	0	Dinas Komunikasi dan informatika	
		Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	0	Dinas Komunikasi dan informatika	
		Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	0	Dinas Komunikasi dan informatika	
22.	Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	9	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	10	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, mdan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	10	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
		Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	10	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	3	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	3	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/kota	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
		Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
23.	Perpustakaan	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	34,19	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	8,78	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,27	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	2.260	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	4	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	2	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
24.	Kearsipan	persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	7	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah	1	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
		kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi			
		Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
Urusan Pilihan					
25.	Kelautan dan Perikanan	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	1569	Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	
		Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	0	Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	
		Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	0	Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	
		Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	130	Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	
		Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	191.153	Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	
26.	Pariwisata	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
		Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	7	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	10	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	4	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
		Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
27.	Pertanian	Sarana pertanian yang diberikan	53	Dinas Pertanian	
		Prasarana pertanian yang digunakan	53	Dinas Pertanian	
		Penerbitan izin usaha pertanian	0	Dinas Pertanian	
		Persentase prasarana yang digunakan	100	Dinas Pertanian	
		Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota	0	Dinas Pertanian	
		Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	0	Dinas Pertanian	
28.	Kehutanan	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	0		
		Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	0		
		Pemulihan ekosistem pada Tahura	0		
		Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	0		
29.	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	0		
30.	Perdagangan	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
		ketentuan untuk izin Pusat perbelanjaan			
		Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Toko swalayan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase penerbitan TDG	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase koefisien variasi harga antar waktu	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
31.	Perindustrian	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI)	1251	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
		kecil dan IUI menengah yang diterbitkan			
		Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
32.	Transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	0		
		Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	0		
		Jumlah satuan pemukiman yang dibina	0		



2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil
Kabupaten Padang Lawas Utara TA. 2023

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA			SUMBER DATA	KET
1.	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	7.805	67,73	Dinas Pendidikan	
			Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Kab/ Kota yang bersangkutan	11.524			
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar sederajat	41.526	110,58		
			Jumlah anak usia 7-12 tahun pada Kab/ Kota yang bersangkutan	37.554			
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama	16.262	83,30		
			Jumlah anak usia 13-15 tahun pada Kab/ Kota yang bersangkutan	19.522			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA			SUMBER DATA	KET
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	262	0,34		
			Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada provinsi yang bersangkutan	76.552			
2	Kesehatan	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan	100	0,037	Dinas Kesehatan dan RSUD	
			Jumlah Penduduk di kabupaten/kota	270.958			
		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi	1	100		
			Jumlah RS di kabupaten/kota	1			
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	7.611	94		
			Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota	8.075			
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	7.158	92,9		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KET
			Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota	7.708		
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	7.158	97,5	
			Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota	7.341		
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	33.637	95.1	
			Jumlah balita di kabupaten/kota	35.362		
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	36.532	96,11	
			Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota	38.001		
		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	145.406	83,6	
			Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota	173.933		
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang	27.609	85	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA			SUMBER DATA	KET
		mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar				
			Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten/kota	32.406			
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	39.133	83,4		
			Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota	46.941			
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2.427	100		
			Jumlah penderita DM di kabupaten/kota	2.427			
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	341	81,4		
			Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota	419			
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5.340	94,5		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA			SUMBER DATA	KET
			Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota	5.648			
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	7.136	83,5		
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota	8.551			
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)	3,71	19,12	Dinas PUPR	
			Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)	19,4			
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m)	0	0		
			Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di	0			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA			SUMBER DATA	KET
			WS Kewenangan kabupaten/kota (m)				
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan danelihara (ha) di tahun eksisting	12.522	10,47		
			luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota	1.310,85			
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota	40.945	83,57		
			Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut.	48.993			
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang	0	0		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA			SUMBER DATA	KET
			memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD				
			Jumlah rumah di Kabupaten Padang Lawas Utara	61.258			
		Rasio kepatuhan IMB kab/kota	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya	44	100		
			Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku	44			
		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap	620,39	52,10		
			Jumlah total panjang jalan kabupaten/kota	1.190,81			
		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabu/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis	18	100		
			Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota	18			
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi	161	100		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA			SUMBER DATA	KET
			Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	161			
4	Perumahan Rakyat	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2023	0	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
			Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2023	0			
		Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni	0	0		
			Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	0			
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh	8	0		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA			SUMBER DATA	KET
			dibawah 10 ha yang ditangani (ha)				
			Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	33,03			
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni	432	0,77		
			Jumlah total unit rumah kabupaten/kot	56.120			
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	5	0,001		
			Jumlah unit rumah kab/kota	56.120			
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani	23	100	Satpol PP dan BPBD	
			Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	23			
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/ Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan	26	100		
			Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuatsanksi	26			
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan	Jumlah warga negara yang memperoleh	188.630	100		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA			SUMBER DATA	KET
		informasi rawan bencana	layanan informasi rawan bencana				
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan	188.630			
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	37.592	19,93		
			Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	188.630			
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	16.159	100		
			Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana	16.159			
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat	5	17,86		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA			SUMBER DATA	KET
			Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam Tingkat				
			Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota	28			
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	15 Menit	15 Menit		
6	Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	110	7,69	Dinas Sosial	
			Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	1.300			
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran	20	100		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KET
			Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	20		
7	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD	1	100	Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan
			Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota	1		
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	48	0,30	
			Jumlah tenaga kerja keseluruhan	15.849		
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)	9.387.450.000	59.230.550,82	
			Jumlah tenaga kerja	15.849		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA			SUMBER DATA	KET
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	51	100		
			Jumlah Perusahaan	51			
		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan	43	40,95		
			Jumlah pencaker yang terdaftar	105			
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD	12.045.465	0,0009	Dinas P2PAP2KB	
			Jumlah seluruh belanja langsung APBD	1.232.634.313.548			
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi	8	80		
			Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)	10			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA			SUMBER DATA	KET
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan	2	0,001		
			Jumlah penduduk perempuan	133.829			
9	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan	130.412	816.095,12	Dinas Ketahanan Pangan	
			Jumlah kebutuhan pangan	15,98			
10	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	0	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
			seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	0			
		Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	0	0		
			Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	0			
		Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi	0	0		
			Luas izin lokasi yang diterbitkan	0			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA			SUMBER DATA	KET
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha	0	0		
			Jumlah penerima tanah obyek landreform	0			
		Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah	0	0		
			Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan	0			
		Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani	0	0		
			Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan	0			
11	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	72,87	72,87	Dinas Lingkungan Hidup	
		Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Jumlah Total Vol sampah yang dapat ditangani	13.764,15	6,18		
			Jumlah seluruhTotal vol timbunan sampah tahun berjalankabupaten/kota	222.682,12			
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan,	22	100		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA			SUMBER DATA	KET
		PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kab/Kota				
			usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	22			
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP elektronik	Jumlah Penduduk wajib KTP-el yang telah melakukan perekaman	170.306	95,36	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	
			Jumlah penduduk wajib KTP-el	178.596			
		Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA	30.348	33,81		
			Jumlah anak usia 0-17 tahun	89.758			
		Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir	90.123	93,55		
			Jumlah anak usia 0-18 tahun	96.340			
		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	4	21,95		
			Jumlah OPD	41			
13	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per	187	94,79	Dinas PMD	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA			SUMBER DATA	KET
			tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun				
			Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun 2023)	192			
		Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	127	106,72		
			Jumlah desa berkembang (per-awal tahun 2023)	119			
14	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)			3,09	Dinas P2PAP2KB	
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern	20.639	63,41		
			Jumlas Pasangan Usia Subur	32.550			
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	5.150	16		
			Jumlas Pasangan Usia Subur	32.550			
15	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Rasio konektivitas Kabupaten atau Kota = (IK1 x bobot angkutan	Rasio Konektivitas Kabupaten	1	Dinas Perhubungan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KET
			jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) o IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut) o IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)= jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten/kota tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut) Keterangan: IK1 (Angkutan Jalan) - Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP - Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP	$\begin{aligned} &= (1 \times 1) + (0 \times 0) \\ &= 1 + 0 \\ &= 1 \end{aligned}$		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA			SUMBER DATA	KET
			dalam kurun waktu tertentu IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan) - Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasa perintis ditambah lintasan komersil - Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan: 1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan =				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA			SUMBER DATA	KET
			30) 2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50) 3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70) 4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100) Bobot Trayek atau Lintas: a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1 b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA			SUMBER DATA	KET
			seminggu), bobot = 0.8 c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5				
		Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	V/C Ratio di Jalan kabupaten/kota	$\frac{\text{Volume Lalu Lintas} / \text{Kapasitas Lalu Lintas} \times 100\%}{(792 \text{ Unit/Jam}) / (792 \text{ Unit/ Jam}) \times 100\%}$ $\frac{792}{792} = 1$	1		
16	Komunikasi dan Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	3	7,32	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Jumlah OPD	41			
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	3	100		
			Jumlah Layanan Publik	3			
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program	227.378	87		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA			SUMBER DATA	KET
		prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota				
			Jumlah penduduk	260.720			
17	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Koperasi yangberkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset	10	9,80	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan	
			Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset	102			
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	6.300	36,77		
			Jumlah usaha mikro keseluruhan	17.135			
18	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	(Jumlah investasi tahun 2023 - jumlah investasi tahun 2022) di kabupaten/kota	1.575.554.247.051	142,90	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Jumlah investasi tahun 2022 di kabupaten/kota	1.102.589.948.691			
19	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kab/kota	56	0,07	Dinas Pemuda dan Olahraga	
			Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota	78.441			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA			SUMBER DATA	KET
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota	384	0,49		
			jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota	78.441			
		Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	0	0		
20	Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	29	70,73	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			jumlah OPD	41			
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	29	70,73		
			jumlah OPD	41			
21	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Jumlah area penilaian	0			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA			SUMBER DATA	KET
22	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	9	19,57	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
			Jumlah cagar budaya yang terdata	46			
23	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca Masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat		43,24	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur Pembangunan literasi Masyarakat (UPLM) dan aspek Masyarakat (AM)		44,31		
24	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	$T = (a + i + s + j)/4$ T= tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip i = persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik		51,40	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA			SUMBER DATA	KET
			j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN				
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = (m + b + g + a + c + i)/6$ T= tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah kabupaten/kota dengan NSPK a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK		33,33		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA			SUMBER DATA	KET
			I = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK				
25	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP)	4605,83	100,02	Dinas Perikanan Peternakan dan Kesehatan Hewan	
			Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan	4604,82			
26	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1)	44	440,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
			Jumlah wisatawan tahun n-1	10			
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1)	23.412			
			Jumlah wisatawan tahun n-1	10.547			
		Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual	18.717			
			Jumlah kamar yang tersedia	290			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA			SUMBER DATA	KET
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Total Nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB	320.409.000	2,03		
			Total PDRB Berlaku	15.822.370.000			
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Total realiasi PAD dari sektor pariwisata	320.409.000	0,69		
			Total realisasi PAD	46.383.866.055			
27	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun Produktivitas pertanian per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun	201.870,13	550	Dinas Pertanian	
			luas panen	36.703,66			
		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis kab/ kota	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	2.550	510		
			Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	5			
28	Kehutanan			0			
29	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin di kab/kota	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin	0	0	PUPR	
			Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi	0			
30	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA			SUMBER DATA	KET
		(IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota	0			
		Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi	0	0		
			RDKK	0			
		Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan	0	0		
			jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota	0			
31	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n– Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1)	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1	0			
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP			0		
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	0	0		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA			SUMBER DATA	KET
		(IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dikeluarkan	0			
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	0	0		
			Jumlah izin yang dikeluarkan	0			
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	0	0		
			Jumlah izin yang dikeluarkan	0			
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan - Informasi produksi	0	0		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA			SUMBER DATA	KET
			dan kapasitas produksi - Informasi bahan baku dan bahan penolong - Informasi bahan bakar/ energy - Informasi tenaga kerja				
32	Transmigrasi				0		

2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel 2.4

Capaian Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Kabupaten Padang Lawas Utara TA. 2023

NO	FUNGSI PENUNJANG	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA			SUMBER DATA	KET
1.	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan	86.521.738.880	7,02	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
			Jumlah APBD	1.232.634.313.548			
		Rasio PAD	Jumlah PAD	46.920.768.816	3,93		
			Jumlah Pendapatan pada APBD	1.194.371.801.776			
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3)		2	Inspektorat	



NO	FUNGSI PENUNJANG	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA			SUMBER DATA	KET
			berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP				
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP		1		
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures	710.504.024.748,00	57,64	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
			jumlah belanja APBD	1.232.634.313.548			
		Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan		WTP		
2.	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun 2023	0	0	Bagian ULP	
			jumlah kontrak keseluruhan tahun 2023	184			
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	184	9,17		



NO	FUNGSI PENUNJANG	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA			SUMBER DATA	KET
			Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif	2006			
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan total belanja langsung	91.006.529.759	39,04		
			total belanja langsung	233.120.000.000			
		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)	(140.378.419.832)	(60,67)		
			Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)	231.384.949.591			
3.	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas	840	245,61	Badan pegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah	342			
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki	271	22,93		



NO	FUNGSI PENUNJANG	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA			SUMBER DATA	KET
		guru dan tenaga kesehatan)	sertifikat kompetensi				
			seluruh jumlah pegawai non Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	1182			
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi	65	23,99		
			seluruh jumlah pegawai non Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	271			
4.	Manajemen Keuangan	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi	1.122.954.262.015,00	(8,90)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
			total belanja APBD dikurangi satu	1.232.634.313.548,00			
		Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Nilai absolut dari Total PAD dalam realisasi	46.383.866.055,01	15,38		
			total PAD dalam APBD dikurangi satu	40.201.587.057,00			
		Manajemen Aset	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun	1. Ya 2. Tidak 3. Ya 4. Ya			



NO	FUNGSI PENUNJANG	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA			SUMBER DATA	KET
			daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)				
		Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai realisasi SILPA	54.188.621.572,98	96,09		
			total belanja anggaran tahun sebelumnya	1.386.093.923.239,00			
5.	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	274.266.061	98,80	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	277.597.200			
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda	22	100		
			total jumlah dokumen yang telah dirinci	22			

2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah. Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah memuat :

a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Tahun 2023 merupakan tahun Kelima dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023, Kabupaten Padang Lawas Utara secara terencana dan berkesinambungan melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, termasuk didalamnya adalah Perencanaan Kinerja 2032 yang merupakan proses perencanaan kinerja yang didokumentasikan dalam Rencana Kinerja Tahunan (*Annual Performance Plan*).

Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Salah satu alat ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran atau kegiatan utama dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja di masa depan adalah Indikator Kinerja Utama. Dengan telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 62 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021-2023, hal ini sebagai indikator keberhasilan Kabupaten Padang Lawas Utara, maka IKU harus terdapat dalam perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja. Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023 :

Tabel 2.5
Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah
Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023

Prioritas Pembangunan		Tujuan Pembangunan		Sasaran Strategis		Indikator Sasaran		Target
1	Meningkatkan Manajemen Pelayanan Umum Pemerintah yang Prima	1	Peningkatan Kualitas SDM yang dimiliki melalui Pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang yang dibutuhkan	1	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	1	Indeks Pelayanan Publik	B
		2	Menciptakan system kerja yang dapat mempermudah masyarakat dalam menerima pelayanan serta menghindari terjadinya praktik pungli melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2	Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN	2	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP
		3	Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana guna mendukung kelancaran dalam proses pelayanan kepada Masyarakat	3	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	3	Predikat Akuntabilitas Kinerja	B
2	Meningkatkan akses dan pemerataan kualitas pendidikan dan Kesehatan	4	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan Kesehatan	4	Meningkatkan derajat pendidikan	4	Rata-rata lama sekolah	9,93
		5	Penyediaan dan Peningkatan tenaga pendukung pendidikan dan kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkala dan berkelanjutan					
		6	Pemerataan penempatan tenaga pendidik dan kesehatan			5	Harapan Lama Sekolah	13,63



Prioritas Pembangunan		Tujuan Pembangunan		Sasaran Strategis		Indikator Sasaran		Target
			sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah					
		7	Melakukan kerjasama dengan lembaga/instansi terkait peningkatan mutu pendidikan	5	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	6	Angka Harapan Hidup	68
3	Meningkatkan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia, diarahakan	8	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kesehatan	6	Meningkatnya partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	7	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95
		9	Melakukan Kerjasama dengan Lembaga Pelatihan Swasta dalam hal menciptakan tenaga kerja terampil					
		10	Peningkatan promosi sumber daya alam dan produk unggulan guna menarik minat investor	7	Meningkatnya jumlah tenaga kerja terampil	8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	66,40
		11	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pada wilayah potensi sumber daya alam yang ada					
		12	Pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam dibidang pariwisata					
4	Meningkatkan Ketahanan Pangan melalui revitalisasi pertanian, Perkebunan, peternakan, dan perikanan	13	Peningkatan hasil produktivitas pertanian dan Perkebunan secara berkelanjutan melalui penggunaan teknologi tepat guna	8	Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat	9	Indeks Gini	0,18
		14	Peningkatan kesejahteraan petani dan pekebun melalui pembelian bibit, jaminan ketersediaan pupuk dan pemasaran hasil					
		15	Pengembangan potensi peternakan dan perikanan secara berkelanjutan melalui penggunaan teknologi tepat guna					

Prioritas Pembangunan		Tujuan Pembangunan		Sasaran Strategis		Indikator Sasaran		Target
5	Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Miskin	16	Penguatan kelompok tani bidang pertanian dan peternakan melalui pembinaan dan pendampingan			10	Tingkat Kemiskinan	9,10
		17	Pengembangan sistem pertanian terintegrasi					
		18	Pelaksanaan program perlindungan dan jaminan social bagi Masyarakat miskin berupa bantuan social					
6	Mengembangkan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan Pariwisata dan Teknologi Tepat Guna	19	Penguatan lembaga dan sumber daya manusia dibidang perkoperasian	9	Meningkatnya pertumbuhan Kepariwisata daerah	11	Jumlah Kunjungan Wisatawan	18.750
		20	Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat miskin melalui pelatihan sektor UMKM dan IKM					
7	Meningkatkan infrastruktur untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi dan kemandirian daerah	21	Pengembangan potensi wisata daerah melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung	10	Meningkatnya investasi dalam rangka percepatan Pembangunan daerah	12	Tingkat Pertumbuhan Investasi	25
		22	Peningkatan kualitas SDM dibidang kepariwisataan ekonomi kreatif	11	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Dasar	13	Cakupan Aksesibilitas Antar Wilayah	50
7	Meningkatkan infrastruktur untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi dan kemandirian daerah	23	Peningkatan dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar	12	Meningkatnya Kepatuhan dalam pemanfaatan ruang sesuai RTRW dan RDTR	14	Persentase Kepatuhan terhadap RTRW dan RDTR	60
		24	Pembangunan infrastruktur daerah dalam rangka menciptakan aksesibilitas antar wilayah					

Prioritas Pembangunan		Tujuan Pembangunan		Sasaran Strategis		Indikator Sasaran		Target
				13	Meningkatnya Pembangunan berkelanjutan	15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	47

b. Pengukuran Capaian Kinerja dibanding dengan Target Perjanjian Kerja

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran. Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performanceresult*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel 2.6
Capaian Kinerja Tahun 2023
Kabupaten Padang Lawas Utara

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target IKU	Capaian IKU	Program Prioritas Pengungkit Sasaran	Dinas Penanggungjawab (Cross Cutting IKU)
1	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	B-	B	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
					Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
					Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPSTP
2	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	Hasil Belum Keluar	Program Penyelenggaraan Pengawasan	INSPEKTORAT DAERAH
					Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPD
					Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target IKU	Capaian IKU	Program Prioritas Pengungkit Sasaran	Dinas Penanggungjawab (Cross Cutting IKU)
3	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Predikat Akuntabilitas Kinerja	B	CC	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	INSPEKTORAT DAERAH
					Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	BAPELITBANGDA
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	SEKRETARIAT DAERAH
4	Meningkatnya Derajat Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah	9,93	9,55	Program Pengelolaan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
		Harapan Lama Sekolah	13,63	13,53	Program Penyelenggaraan Jalan	DINAS PUTR
5	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	68	71,57	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINAS KESEHATAN
					Program Pembinaan Keluarga Berencana	DPPPAPPKB
					Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	DINAS KETAHANAN PANGAN
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DINAS PUTR
6	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95	88,10	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DPPPAPPKB
					Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	KESBANGPOL
7	Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Terampil	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	66,40	73,41	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	DISKOPUMKM NAKER



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target IKU	Capaian IKU	Program Prioritas Pengungkit Sasaran	Dinas Penanggungjawab (Cross Cutting IKU)
					Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
8	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Gini	0,18	0,24	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
					Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DINAS PERTANIAN
		Tingkat Kemiskinan	9,10	8,79	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	DINAS SOSIAL
9	Meningkatnya Pertumbuhan Kepariwisata Daerah	Jumlah Kunjungan Wisatawan	18.750	39.638	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
					Program Penyelenggaraan Jalan	DINAS PUTR
					Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	DINAS PERKIM
					Program Pengelolaan Persampahan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10	Meningkatnya Investasi Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Daerah	Tingkat Pertumbuhan Investasi	25	143	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPSTP
					Program Perekonomian dan Pembangunan	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
11	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Dasar	Cakupan Aksesibilitas Antar Wilayah	50	52,10	Program Penyelenggaraan Jalan	DINAS PUTR
12	Meningkatnya Kepatuhan Dalam Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW dan RDTR	Persentase Kepatuhan Terhadap RTRW dan RDTR	60	67,72	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	DINAS PUTR
					Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	SATPOL PP
					Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPSTP

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target IKU	Capaian IKU	Program Prioritas Pengungkit Sasaran	Dinas Penanggungjawab (Cross Cutting IKU)
13	Meningkatnya Pembangunan Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	47	72,87	Program Pengendalian Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/ Kota	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

c. Pengukuran Capaian Kinerja dibanding dengan Tahun Sebelumnya

Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.7
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023
Kabupaten Padang Lawas Utara

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Capaian 2022
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian	
Indeks Pelayanan Publik	Nilai Indeks	B-	B	Sesuai Target	B -
Opini atas LKP	Status Indeks	WTP	Belum Ditetapkan	---	WTP
Predikat Akuntabilitas Kinerja	Status Indeks	B	CC	Belum Sesuai Target	
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,93	9,55	Belum Sesuai Target	9,46
Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,63	13,53	Belum Sesuai Target	13,23
Angka Harapan Hidup	Tahun	68	71,57	Melebihi Target	67,76
Indeks Pembangunan Gender	Nilai Indeks	95	88,10	Belum Sesuai Target	88,10

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Capaian 2022
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	66,40	73,41	Melebihi Target	70,33
Indeks GINI	Nilai Indeks	0,18	0,24	Belum Sesuai Target	0,25
Tingkat Kemiskinan	Persen	9,10	8,79	Melebihi Target	8,94
Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	18.750	39.638	Melebihi Target	23.412
Pertumbuhan Investasi	Persen	25	143	Melebihi Target	-15,262
Cakupan Aksesibilitas Antara Wilayah (Jalan)	Persen	50	52,10	Melebihi Target	59,91
Persentase Kepatuhan terhadap RTRW dan RDTR	Persen	60	67,72	Melebihi Target	45
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	47	72,87	Melebihi Target	70,66

d. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah

Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah dapat kita lihat tabel dibawah ini :

Tabel 2.8
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 dan
Target Perubahan RPJMD (2021 s/d 2023)
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian			
Indeks Pelayanan Publik	Nilai Indeks	B-	B	Sesuai Target	-	D	B -
Capaian Kinerja Sasaran 1							
Opini atas LKP	Status Indeks	WTP	Hasil Belum Ditetapkan	--	WDP	WDP	WTP
Capaian Kinerja Sasaran 2							
Predikat Akuntabilitas Kinerja	Status Indeks	B	CC	Belum Sesuai Target	C	CC	
Capaian Kinerja Sasaran 3							
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,93	9,55	Belum Sesuai Target	98,84	97,38	9,46
Capaian Kinerja Sasaran 4							
Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,63	13,53	Belum Sesuai Target	12,87	12,87	13,23
Capaian Kinerja Sasaran 4							
Angka Harapan Hidup	Tahun	68	71,57	Melebihi Target			67,53
Capaian Kinerja Sasaran 5							
Indeks Pembangunan Gender	Nilai Indeks	95	88,10	Belum Sesuai Target	87,92	88,06	67,53
Capaian Kinerja Sasaran 1							
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	66,40	73,41	Melebihi Target	66,04	76,82	70,33
Capaian Kinerja Sasaran 1							
Indeks GINI	Nilai Indeks	0,18	0,24	Belum Sesuai Target	0,22	0,25	0,25
Capaian Kinerja Sasaran 1							
Tingkat Kemiskinan	Persen	9,10	8,79	Melebihi Target	9,70	9,92	8,94

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian			
Capaian Kinerja Sasaran 1							
Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	18.750	39.638	Melebihi Target	12.699	15.094	23.412
Capaian Kinerja Sasaran 9							
Pertumbuhan Investasi	Persen	25	143	Melebihi Target	127,9%	105%	-15%
Capaian Kinerja Sasaran 10							
Cakupan Aksesibilitas Antara Wilayah (Jalan)	Persen	50	52,10	Melebihi Target	65	36,34	59,91
Capaian Kinerja Sasaran 11							
Persentase Kepatuhan terhadap RTRW dan RDTR	Persen	60	67,72	Melebihi Target	35%	30%	45%
Capaian Kinerja Sasaran 12							
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	47	72,87	Melebihi Target	75	60,52	70,66
Capaian Kinerja Sasaran 13							

e. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dikaitkan dengan Hasil Kinerja yang Telah Tercapai

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian			
Indeks Pelayanan Publik	Nilai Indeks	B -	B	Sesuai Target	-	D	B -
Capaian Kinerja Sasaran 1							
Posisi Capaian Kinerja terhadap BenchMark (dalam Sumatera Utara/ Nasional) :							

Sumber Data : Kementerian PAN RB Republik Indonesia

Kajian Efisiensi Program Pengungkit IKU : • Capaian kualitas sistem pelayanan publik diketahui bahwa total alokasi anggaran pada program diatas mencapai Rp. 24.265.940.993,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 22.774.417.160,- atau sekitar 93,85% dan hal tersebut menggambarkan

adanya Upaya efisiensi anggaran dalam proses pencapaian target.

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian			
Opini atas LKPD	Status Indeks	WTP	Hasil Belum Ditetapkan	--	WDP	WDP	WTP
Capaian Kinerja Sasaran 2							
Posisi Capaian Kinerja terhadap BenchMark (dalam Sumatera Utara/ Nasional) : belum dapat ditentukan disebabkan belum ditetapkan oleh BPK RI Perwakilan Sumatera Utara							

Sumber Data : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Kajian Efisiensi Program : • Capaian kualitas sistem pelayanan publik diketahui bahwa total alokasi anggaran pada program diatas mencapai Rp. 2.349.897.600,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.286.248.870,- atau 97,29% dan hal tersebut menggambarkan adanya upaya efisiensi anggaran dalam proses pencapaian target.

Pengungkit IKU

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian			
Indeks SAKIP	Status Indeks	B	CC	Belum Sesuai Target	C	CC	
Capaian Kinerja Sasaran 3							
Posisi Capaian Kinerja terhadap BenchMark (dalam Sumatera Utara/ Nasional) :							

Sumber Data : Kementerian PAN RB Republik Indonesia

Kajian Efisiensi Program : • Capaian kualitas sistem pelayanan public diketahui bahwa total alokasi anggaran pada program diatas mencapai Rp.24.499.764.693,- dan telah terealisasi sebesar Rp.23.002.856.999,- atau 93,89% dan hal tersebut menggambarkan adanya upaya efisiensi anggaran dalam proses pencapaian target.

Pengungkit IKU

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian			
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,93	9,55	Belum Sesuai Target	98,84	97,38	9,46
Capaian Kinerja Sasaran 4							
Posisi Capaian Kinerja terhadap BenchMark (dalam Sumatera Utara/Nasional) :							

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas Utara

Kajian Efisiensi Program : • Capaian kualitas sistem pelayanan publik diketahui bahwa total alokasi anggaran mencapai Rp. 74.128.024.228,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 26.722.739.900,- atau 36,05% dan hal tersebut menggambarkan adanya upaya efisiensi anggaran dalam proses pencapaian target.

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian			
Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,63	13,53	Belum Sesuai Target	12,87	12,87	13,23
Capaian Kinerja Sasaran 4							
Posisi Capaian Kinerja terhadap BenchMark (dalam Sumatera Utara/ Nasional) :							

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas Utara

Kajian Efisiensi Program : • Capaian kualitas sistem pelayanan public diketahui bahwa total alokasi anggaran mencapai Rp. 42.157.881.068,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 31.862.484.100,- atau 75,58% dan hal tersebut menggambarkan adanya upaya efisiensi anggaran dalam proses pencapaian target.

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian			
Angka Harapan Hidup	Tahun	68	71,57	Melebihi Target			67,53
Capaian Kinerja Sasaran 5							
Posisi Capaian Kinerja thd BenchMark (dalam Sumatera Utara/Nasional) :							

Sumber Data :

Kajian Efisiensi Program Pengungkit IKU : • Capaian kualitas sistem pelayanan publik diketahui bahwa total alokasi anggaran mencapai Rp. 87.134.617.711,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 53.803.699.623,- atau 61,75% dan hal tersebut menggambarkan adanya upaya efisiensi anggaran dalam proses pencapaian target.

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian			
Indeks Pembangunan Gender	Nilai Indeks	95	88,10	Belum Sesuai Target	87,92	88,06	67,53
Capaian Kinerja Sasaran 1							
Posisi Capaian Kinerja thd BenchMark (dalam Sumatera Utara/Nasional) :							

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas Utara

Kajian Efisiensi Program Pengungkit IKU : • Capaian kualitas sistem pelayanan publik diketahui bahwa total alokasi anggaran mencapai Rp. 2.498.739.159,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 485.295.812,- atau 19,42% dan hal tersebut menggambarkan adanya upaya efisiensi anggaran dalam proses pencapaian target.

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian			
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	66,40	73,41	Melebihi Target	66,04	76,82	70,33
Capaian Kinerja Sasaran 1							
Posisi Capaian Kinerja thd BenchMark (dalam Sumatera Utara/Nasional) :							

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas Utara

Kajian Efisiensi Program Pengungkit IKU :

- Capaian kualitas sistem pelayanan publik diketahui bahwa total alokasi anggaran mencapai Rp. 1.769.564.800,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.702.720.588,- atau 96,22% dan hal tersebut menggambarkan adanya upaya efisiensi anggaran dalam proses pencapaian target.

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian			
Indeks GINI	Nilai Indeks	0,18	0,24	Belum Sesuai Target	0,22	0,25	0,25
Capaian Kinerja Sasaran 1							
Posisi Capaian Kinerja thd BenchMark (dalam Sumatera Utara/Nasional) :							

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas Utara

Kajian Efisiensi Program Pengungkit IKU :

- Capaian kualitas sistem pelayanan publik diketahui bahwa total alokasi anggaran mencapai Rp. 2.873.922.700,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.757.340.054,- atau 95,94% dan hal tersebut menggambarkan adanya upaya efisiensi anggaran dalam proses pencapaian target.

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian			
Tingkat Kemiskinan	Persen	9,10	8,79	Belum Sesuai Target	9,70	9,92	8,94
Capaian Kinerja Sasaran 1							
Posisi Capaian Kinerja thd BenchMark (dalam Sumatera Utara/Nasional) :							

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas Utara

Kajian Efisiensi Program Pengungkit IKU : • Capaian kualitas sistem pelayanan publik diketahui bahwa total alokasi anggaran mencapai Rp. 1.400.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.377.085.999,- atau 98,36% dan hal tersebut menggambarkan adanya upaya efisiensi anggaran dalam proses pencapaian target.

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian			
Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	18.750	39.638	Melebihi Target	12.699	15.094	23.412
Capaian Kinerja Sasaran 9							
Posisi Capaian Kinerja thd BenchMark (dalam Sumatera Utara/Nasional) :							

Sumber Data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Padang Lawas Utara

Kajian Efisiensi Program Pengungkit IKU : • Capaian kualitas sistem pelayanan publik diketahui bahwa total alokasi anggaran mencapai Rp. 60.887.688.799,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 50.440.680.650,- atau 82,84% dan hal tersebut menggambarkan adanya upaya efisiensi anggaran dalam proses pencapaian target.

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian			
Pertumbuhan Investasi	Persen	25	143	Melebihi Target	127,9%	105%	-15%
Capaian Kinerja Sasaran 10							
Posisi Capaian Kinerja thd BenchMark (dalam Sumatera Utara/Nasional) :							

Sumber Data : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara

Kajian Efisiensi Program Pengungkit IKU : • Capaian kualitas sistem pelayanan publik diketahui bahwa total alokasi anggaran mencapai Rp. 1.924.975.200,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.777.086.887,- atau 92,32% dan hal tersebut menggambarkan adanya upaya efisiensi anggaran dalam proses pencapaian target.

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian			
Cakupan Aksesibilitas Antara Wilayah (Jalan)	Persen	50	52,10	Melebihi Target	65	36,34	59,91
Capaian Kinerja Sasaran 11							
Posisi Capaian Kinerja thd BenchMark (dalam Sumatera Utara/Nasional) :							

Sumber Data : Dinas PUTR Kabupaten Padang Lawas Utara

Kajian Efisiensi Program Pengungkit IKU : • Capaian kualitas sistem pelayanan publik diketahui bahwa total alokasi anggaran mencapai Rp. 2.560.037.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.285.913.400,- atau 50,23% dan hal tersebut menggambarkan adanya upaya efisiensi anggaran dalam proses pencapaian target.

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian			
Persentase Kepatuhan terhadap RTRW dan RDTR	Persen	60	67,72	Melebihi Target	35%	30%	45%
Capaian Kinerja Sasaran 12							
Posisi Capaian Kinerja thd BenchMark (dalam Sumatera Utara/Nasional) :							

Sumber Data :

Kajian Efisiensi Program Pengungkit IKU : • Capaian kualitas sistem pelayanan publik diketahui bahwa total alokasi anggaran mencapai Rp. 13.769.962.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 9.936.258.000,- atau 72,16% dan hal tersebut menggambarkan adanya upaya efisiensi anggaran dalam proses pencapaian target.

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian			
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	47	72,87	Melebihi Target	75	60,52	70,66
Capaian Kinerja Sasaran 13							
Posisi Capaian Kinerja thd BenchMark (dalam Sumatera Utara/Nasional) :							

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Lawas Utara

Kajian Efisiensi Program Pengungkit IKU : • Capaian kualitas sistem pelayanan publik diketahui bahwa total alokasi anggaran mencapai Rp.0,- dan telah terealisasi sebesar Rp.0,- atau 0,00% dan hal tersebut menggambarkan adanya upaya efisiensi anggaran dalam proses pencapaian target.

Dalam rangka mendukung program program Pembangunan selama tahun 2023 dibutuhkan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Fokus prioritas pendanaan dan penggunaan APBD Tahun 2023 telah ditetapkan dan dirumuskan serta disepakati dalam Dokumen Kebijakan Umum

APBD dan Penetapan Plafond Anggaran Sementara. Selanjutnya Pemerintah Daerah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 sebagai perencanaan keuangan yang akan dipedomani dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

f. Analisa Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Berikut dibawah ini kita tampilkan Tabel Analisa Program Kegiatan untuk mencapai target Kinerja Tahun 2023

Tabel 2.9
Analisa Program Kegiatan untuk mencapai target Kinerja Tahun 2023

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Pendukung Sasaran	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	641.985.600	638.024.861	99,38
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	411.000.000	411.000.000	100
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	23.002.955.793	21.516.706.799	93,54
			Program Pelayanan Penanaman Modal	209.999.600	208.685.500	99,37
TOTAL				24.265.940.993	22.774.417.160	93,85
2	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Program penyelenggaraan pengawasan	1.778.907.600	1.753.816.300	98,59
			Program pengelolaan keuangan daerah	353.320.000	328.073.245	92,85
			Program Kepegawaian Daerah	217.670.000	204.359.325	93,88
TOTAL				2.349.897.600	2.286.248.870	97,29
3	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Predikat Akuntabilitas Kinerja	Program perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi	217.493.500	215.440.400	99,06
			Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.279.315.400	1.270.709.800	99,33



NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Pendukung Sasaran	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	23.002.955.793	21.516.706.799	93,54
TOTAL				24.499.764.693	23.002.856.999	93,89
4	Meningkatnya derajat Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	74.128.024.228	26.722.739.900	36,05
		TOTAL		74.128.024.228	26.722.739.900	36,05
		Harapan Lama Sekolah	Program Program Penyelenggaraan Jalan	42.157.881.068	31.862.484.100	75,58
		TOTAL		42.157.881.068	31.862.484.100	75,58
5	Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	61880031361	30.022.879.123	48,52
			Program Pembinaan Keluarga Berencana	10536269900	10.016.293.200	95,06
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	142.383.450	142.202.850	99,87
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	14.575.933.000	13.622.324.450	93,46
TOTAL				87.134.617.711	53.803.699.623	61,75
6	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	369.999.800	338.278.412	91,43
			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	2.128.739.359	147.017.400	6,91
TOTAL				2.498.739.159	485.295.812	19,42
7	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	539.693.400	527.495.800	97,76
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1.229.971.400	1.175.224.788	95,55



NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Pendukung Sasaran	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
TOTAL				1.769.564.800	1.702.720.588	96,22
8	Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat	Indeks Gini	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	807.790.100	806.407.854	99,83
			Program penyediaan dan pengembangan Prasarana pertanian	2.066.132.600	1.950.932.200	94,42
		TOTAL		2.873.922.700	2.757.340.054	95,94
		Tingkat Kemiskinan	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	1.345.000.000	1.322.994.199	98,36
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	55.000.000	54.091.800	98,35
		TOTAL		1.400.000.000	1.377.085.999	98,36
9	Meningkatnya pertumbuhan kepariwisataan daerah	Jumlah kunjungan wisata	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	343.000.000	256.433.100	74,76
			Program Penyelenggaraan Jalan	42.175.881.068	31.862.484.100	75,55
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	16.504.903.431	16.457.859.150	99,71
			Program Pengelolaan Persampahan	1.863.904.300	1.863.904.300	100,00
		TOTAL		60.887.688.799	50.440.680.650	82,84
10	Meningkatnya Investasi dalam rangka percepatan Pembangunan daerah	Pertumbuhan Investasi	Program pengembangan iklim penanaman modal	69.999.500	69.711.000	99,59
			Program Perekonomian dan Pembangunan	1.854.975.700	1.707.375.887	92,04
		TOTAL		1.924.975.200	1.777.086.887	92,32
11	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar	Cakupan Aksesibilitas Antar Wilayah	Program Penyelenggaraan Jalan	2.560.037.000	1.285.913.400	50,23
TOTAL				2.560.037.000	1.285.913.400	50,23
12	Meningkatnya Kepatuhan	Persentase Kepatuhan	Program penyelenggaraan Penataan Ruang	2.560.037.000	1.285.913.400	50,23



NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Pendukung Sasaran	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
	dalam pemanfaatan ruang sesuai RTRW dan RDTR	terhadap RTRW dan RDTR	Program Peningkatan Ketentraman dan ketertibaN umum	5.599.451.000	5.593.280.400	99,89
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	490.400.000	485.237.400	98,95
TOTAL				13.769.962.000	9.936.258.000	72,16
13	Meningkatnya Pembangunan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Program pengendalian pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota	0	0	0,00
TOTAL				0	0	0,00

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Kabupaten Padang Lawas Utara sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Pada pasal 1 ayat (11) disebutkan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi kepada daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasal 94 ayat (1) dijelaskan bahwa pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dilaksanakan setelah adanya penugasan pemerintah melalui kementerian negara/lembaga kepada kepala daerah, selaras dengan tindak lanjut implementasi tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten/kota kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Ayat (4) lebih lanjut memaparkan kegiatan tugas pembantuan di daerah dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ditetapkan Gubernur, Bupati atau Walikota.

Sebagaiman diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan tugas pembantuan, penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistim dan prosedur penugasan pemerintah kepada daerah dan/ atau desa, dari pemerintah provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/ atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/ kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan.

3.2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara :

DINAS PERTANIAN

- a. Kementerian yang memberikan penugasan adalah Kementerian Pertanian, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
- b. Bidang urusan yang ditugaspembantukan : Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
- c. Kegiatan :
 1. Optimasi Lahan
 2. Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin Pertanian
 3. Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Pupuk dan Pestisida
 4. Penerima Pupuk Bersubsidi yang Diverifikasi dan Divalidasi
 5. Layanan Manajemen Keuangan
- d. Anggaran
Anggaran yang diberikan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Padang Lawas Utara adalah sebesar Rp. 409.453.000,- (*Empat Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah*).

3.3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara :

DINAS PERTANIAN

3.3.1. Target Kinerja

Target Kinerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu:

1. Optimasi Lahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 332.817.000,- (*Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus TUjuh Belas Ribu Rupiah*);
2. Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*);

3. Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Pupuk dan Pestisida dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.700.000,- (*Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*);
4. Penerima Pupuk Bersubsidi yang Diverifikasi dan Divalidasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.936.000,- (*Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah*); dan
5. Layanan Manajemen Keuangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 18.000.000,- (*Delapan Belas Juta Rupiah*).

3.3.2. Realisasi

Realisasi yang terlaksana oleh Dinas Pertanian Kabupaten Padang Lawas Utara adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya Kegiatan Optimasi Lahan dengan realisasi 99,92% atau sebesar Rp. 332.567.000,- (*Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah*);
2. Terlaksananya Kegiatan Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin Pertanian dengan 79% serapan anggaran atau sebesar Rp. 7.899.600,- (*Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah*);
3. Terlaksananya Kegiatan Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Pupuk dan Pestisida dengan 98,87% dari anggaran yang dipersiapkan atau sebesar Rp. 17.500.000,- (*Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
4. Terlaksananya Kegiatan Penerima Pupuk Bersubsidi yang Diverifikasi dan Divalidasi dengan 99,57% serapan anggaran atau sebesar Rp. 30.804.000,- (*Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Empat Ribu Rupiah*); dan
5. Terlaksananya Kegiatan Layanan Manajemen Keuangan dengan serapan anggaran 100% atau sebesar Rp. 18.000.000,- (*Delapan Belas Juta Rupiah*).



Tabel 3.1
Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi
Yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara

NO	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	KABUPATEN	SKPD PELAKSANA	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	KET
1.	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP.DIPA-018.08.4.079132/2023 Tanggal 1& November 2022	1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Kegiatan 1. Optimasi Lahan <ul style="list-style-type: none"> Keluaran: Terlaksananya Kegiatan Optimasi Lahan Rincian Kegiatan: Belanja Honor Output Kegiatan, Belanja Jasa Konsultan, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Barang Bantuan Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda 2. Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin Pertanian <ul style="list-style-type: none"> Keluaran: Terlaksananya Kegiatan Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin Pertanian Rincian Kegiatan: Belanja Bahan, Belanja Honor Output Kegiatan, 	Padang Lawas Utara	Dinas Pertanian	391.453.000,-	388.770.600	99,31	Terlaksananya Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	TP Provinsi Sumatera Utara



NO	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	KABUPATEN	SKPD PELAKSANA	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	KET
			<p>Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Perjalanan Dinas Peket Meeting Dalam Kota</p> <p>3. Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Pupuk dan Pestisida</p> <ul style="list-style-type: none">• Keluaran: Terlaksananya Kegiatan Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Pupuk dan Pestisida• Rincian Kegiatan: Belanja Bahan, Belanja Jasa Lainnya, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota <p>4. Penerima Pupuk Bersubsidi yang Diverifikasi dan Divalidasi</p> <ul style="list-style-type: none">• Keluaran: Terlaksananya Kegiatan Penerima Pupuk Bersubsidi yang Diverifikasi dan Divalidasi• Rincian Kegiatan: Belanja Honor Output Kegiatan, Belanja Bahan, Belanja Honor Output Kegiatan, Belanja Perjalanan Dinas Biasa							



NO	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	KABUPATEN	SKPD PELAKSANA	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	KET
			<p>2. Program Dukungan Manajemen</p> <p>Kegiatan:</p> <p>1. Layanan Manajemen Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none">Keluaran: Terlaksananya Kegiatan Layanan Manajemen KeuanganRincian Kegiatan: Belanja Honor Operasional Satuan Kerja, Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi, Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Padang Lawas Utara	Dinas Pertanian	18.000.000,-	18.000.000,-	100	Terlaksananya Program Dukungan Manajemen	TP Provinsi Sumatera Utara

3.4. Permasalahan dan Kendala

Permasalahan dan Kendala yang dihadapi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Padang Lawas Utara dalam melaksanakan Kegiatan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Propinsi antara lain:

1. Tidak adanya Bimtek Penggunaan/ Pemeliharaan Alsintan yang dibantu ke Kelompok Tani; dan
2. Keterlambatan Transfer dari Pemerintah Pusat ke Rekening Daerah pada Tahap II dan Tahap III.

3.5. Saran dan Tindak Lanjut

Untuk Tahun berikutnya, kegiatan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah Propinsi kepada Dinas Pertanian Kabupaten Padang Lawas Utara, kami sarankan untuk:

1. Sebaiknya dilakukan bimtek untuk penggunaan/ pemeliharaan alsintan yang diberikan bantuan; dan
2. Agar batas waktu pelaporan diperpanjang.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah Kabupaten/ Kota terdiri atas:

- a. Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Pendidikan Dasar; dan
- c. Pendidikan Kesetaraan

4.1.2. Target Pencapaian SPM

Berikut adalah target pencapaian SPM di Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2023 :

- a. Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini

No.	Indikator	Elemen Data	Target
1	Persentase anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	100%
		Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun	

- b. Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada Sekolah Dasar

No.	Indikator	Elemen Data	Target
1	Persentase jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang sudah tamat	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	100%

	atau sedang belajar di sekolah dasar	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun	
--	--------------------------------------	---	--

c. Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada Sekolah Menengah

No.	Indikator	Elemen Data	Target
1	Persentase jumlah anak usia 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Sekolah Menengah pertama	Jumlah anak usia 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Sekolah Menengah pertama Jumlah anak usia 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun	100%

d. Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan Kesetaraan

No.	Indikator	Elemen Data	Target
1	Persentase jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang partisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang partisipasi dalam pendidikan kesetaraan jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah	100%

4.1.3. Realisasi

Realisasi capaian pelaksanaan penerapan SPM bidang Pendidikan Tahun 2022 di Kabupaten Padang Lawas Utara adalah sebagai berikut :

a. Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini

No.	Indikator	Elemen Data	Realisasi	Capaian	Target
1	Persentase anak usia 5 (lima) sampai	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam)	7.805	67,73%	100%

	dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini			
		Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun	11.524		

b. Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada Sekolah Dasar

No.	Indikator	Elemen Data	Realisasi	Capaian	Target
1	Persentase jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	41.526	110,58%	100%
		Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun	37.554		

c. Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada Sekolah Menengah

No.	Indikator	Elemen Data	Realisasi	Capaian	Target
1	Persentase jumlah anak usia 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Sekolah Menengah pertama	Jumlah anak usia 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Sekolah Menengah pertama	16.262	83,30%	100%
		Jumlah anak usia 12 (dua belas)	19.522		

	Menengah pertama	sampai dengan 15 (lima belas) tahun			
--	------------------	-------------------------------------	--	--	--

d. Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan Kesetaraan

No.	Indikator	Elemen Data	Realisasi	Capaian	Target
1	Persentase jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang partisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang partisipasi dalam pendidikan kesetaraan	262	0,34%	100%
		jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah	76.552		

4.1.4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023 baik secara langsung maupun secara tidak langsung adalah sebesar Rp. 18.154.760,750,- (*Delapan Belas Miliar Seratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*).

4.1.5. Dukungan Personil

Pelaksanaan SPM bidang Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara pada Tahun 2023 didukung oleh personel baik langsung maupun tidak langsung. *Sumber* daya manusia yang terdapat di Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara bisa dilihat pada tabel berikut :

1) Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	SD	2
2	SLTP/ Sederajat	2
3	SLTA/ Sederajat	103
4	D1	3
5	D2	49
6	D3	7
7	S1	1.391
8	S2	32
9	S3	0
JUMLAH		1.589

2) Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	I	3
2	II	32
3	III	1.095
4	IV	459
JUMLAH		1.589

3) Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon/ Jabatan

No	Eselon/ Jabatan	Jumlah
1	I	0
2	II	1
3	III	5
4	IV	9
5	Fungsional	1.574
JUMLAH		1.589

4.1.6. Permasalahan dan Solusi

Berikut adalah beberapa permasalahan dan alternatif solusi dalam pelaksanaan penerapan SPM biketertdang Pendidikan Tahun 2023.

a. Permasalahan

- Verifikasi dan validasi data anak yang tidak sekolah terhenti karena pandemi Covid-19, sehingga database kependudukan yang terintegrasi dengan data pendidikan belum tersedia.
- Masih kurangnya pemahaman dan komitmen pegawai yang menangani urusan pendidikan terhadap penerapan SPM Pendidikan.

b. Solusi

- Pemanfaatan data yang sudah mengintegrasikan data pendidikan dengan data penduduk pada aplikasi SPM yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pada tahun 2023 dibentuk Tim Penerapan SPM Pendidikan dan Tim Penanganan Anak Tidak Sekolah/ Anak Berpotensi Putus Sekolah dengan melibatkan stakeholder terkait.

4.2. URUSAN KESEHATAN

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan Kabupaten yang diselenggarakan oleh satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Kesehatan Dasar

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- d. Pelayanan Kesehatan Balita
- e. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

- f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
- g. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
- h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
- i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
- j. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat
- k. Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis
- l. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)

4.2.2. Target Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah yang mendapatkan layanan kesehatan	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara Usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Warga Negara Usia Lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara Penderita Hipertensi yang	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
		mendapatkan layanan kesehatan	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%
11	Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga Tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%

4.2.3. Realisasi

Berikut realisasi capaian SPM Urusan Kesehatan TA. 2023 yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1	PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	94%
2		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	92,9%



NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
3		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	97,5%
4		Pelayanan Kesehatan Balita	100%	95,1%%
5		Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100%	96,11%
6		Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100%	83,6%
7		Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100%	85%
8		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	83,4%
9		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100%	100%
10		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100%	81,4%
11		Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	100%	94,5%
12		Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human	100%	83,5%

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
		Immunodeficiency Virus)		

4.2.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara untuk mendukung tercapainya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023 bidang Kesehatan di Kabupaten Padang Lawas Utara baik secara langsung adalah sebesar Rp. 2.097.495.800,- (*Dua Miliar Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah*).

4.2.5. Dukungan Personil

Pelaksanaan SPM bidang Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara pada Tahun 2023 didukung oleh personel baik langsung maupun tidak langsung. Sumber daya manusia yang terdapat di Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara bisa dilihat pada tabel berikut :

1) Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	SD	0
2	SLTP/ Sederajat	0
3	SLTA/ Sederajat	21
4	D1	21
5	D2	0
6	D3	564
7	S1	319
8	S2	23
9	S3	0
JUMLAH		948

2) Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	I	0
2	II	359
3	III	545
4	IV	44
JUMLAH		948

3) Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon/ Jabatan

No	Eselon/ Jabatan	Jumlah
1	I	0
2	II	1
3	III	9
4	IV	10
5	Fungsional	928
JUMLAH		948

4.2.6. Permasalahan dan Solusi**a. Permasalahan**

Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan SPM pada dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara.

b. Solusi

Tidak terdapat solusi dalam pelaksanaan pelayanan SPM pada dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas Utara dikarenakan tidak adanya permasalahan.

4.3. URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal adalah jenis pelayanan dasar yang pada hakekatnya merupakan hak bagi setiap warga untuk memperoleh pelayanan, sehingga menjadi kewajiban pemerintah untuk mengadakannya. Jenis Pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air minum sehari-hari
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

4.3.2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) terkait pemenuhan kebutuhan pokok Air Minum sehari-hari di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%
2	Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	100%

4.3.3. Realisasi

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Capaian
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	86,86%
2	Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	100%	68,19%

4.3.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) terkait pemenuhan kebutuhan pokok Air Minum sehari-hari dan Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah sebesar Rp. 15.843.966.200,- (Lima Belas Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah).

4.3.5. Dukungan Personil

Dukungan Personil atau Pegawai yang terlibat dalam Proses Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal adalah :

1) Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	SD	0
2	SLTP/ Sederajat	0
3	SLTA/ Sederajat	4
4	D1	0
5	D2	0
6	D3	0
7	S1	20

8	S2	7
9	S3	0
JUMLAH		31

2) Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	I	0
2	II	3
3	III	23
4	IV	5
JUMLAH		31

3) Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon/ Jabatan

No	Eselon/ Jabatan	Jumlah
1	I	0
2	II	1
3	III	6
4	IV	4
5	Fungsional	20
JUMLAH		31

4.3.6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan SPM pada dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

b. Solusi

Tidak terdapat solusi dalam pelaksanaan pelayanan SPM pada dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dikarenakan tidak adanya permasalahan.

4.4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan dasar dalam bidang Perumahan Rakyat bagi Pemerintah Kabupaten/ Kota telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota.
2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

4.4.2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian pelayanan dasar bidang urusan perumahan dan kawasan Permukiman tergambar pada tabel berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Satuan
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0	Unit
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/ Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	0	Unit

4.4.3. Realisasi

Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Padang Lawas Utara 2023 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	Satuan
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0	0	Unit
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/ Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni	0	0	Unit

4.4.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebesar Rp. 120.000.000,- (*Seratus Dua Puluh Juta Rupiah*).

4.4.5. Dukungan Personil

Dalam upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Padang Lawas Utara adalah sebagai berikut:

1) Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	SD	0
2	SLTP/ Sederajat	0
3	SLTA/ Sederajat	0
4	D1	0
5	D2	0
6	D3	0
7	S1	11
8	S2	3
9	S3	0
JUMLAH		14

2) Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	I	0
2	II	0
3	III	11
4	IV	3
JUMLAH		14

3) Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon/ Jabatan

No	Eselon/ Jabatan	Jumlah
1	I	0
2	II	1
3	III	4
4	IV	2
5	Fungsional	7
JUMLAH		14

4.4.6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan SPM pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Padang Lawas Utara.

b. Solusi

Tidak terdapat solusi dalam pelaksanaan pelayanan SPM pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Padang Lawas Utara dikarenakan tidak adanya permasalahan.

4.5. URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Jenis Pelayanan Dasar Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban
2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
3. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

4.5.2. Target Pencapaian SPM

Target Capaian SPM untuk urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan oleh dinas BPBD dan Satpol PP Kabupaten Padang Lawas Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah Warga Negara Yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	100%
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara Yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	88.630 Jiwa
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	37.592 Jiwa
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban bencana	16.159 Jiwa
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%

4.5.3. Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah Warga Negara Yang memperoleh layanan akibat dari	100%	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi
		penegakan hukum perda dan perkada		
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara Yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	88.630 Jiwa	88.630 Jiwa
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	37.592 Jiwa	37.592 Jiwa
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban bencana	16.159 Jiwa	16.159 Jiwa
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	89,28%

4.5.4. Alokasi Anggaran

Anggaran yang dialokasikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Ketentraman dan Ketertiban TA. 2023 yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satpol PP Kabupaten Padang Lawas Utara adalah sebesar Rp. 1.207.748.600,- (*Satu Miliar Dua Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah*).

4.5.5. Dukungan Personil

Aparatur merupakan unsur pelaksana tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Maka untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas aparatur atau pencapaian hasil kerja ditentukan oleh tingkat kemampuan aparatur, motivasi atau kemauan kerja aparatur, kompensasi atau reward serta penerapan teknologinya.

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM :

1) Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	SD	0
2	SLTP/ Sederajat	0
3	SLTA/ Sederajat	4
4	D1	0
5	D2	0
6	D3	0
7	S1	23
8	S2	3
9	S3	0
JUMLAH		30

2) Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	I	1
2	II	0
3	III	25
4	IV	4
JUMLAH		30

3) Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon/ Jabatan

No	Eselon/ Jabatan	Jumlah
1	I	0
2	II	2
3	III	9
4	IV	9

5	Fungsional	10
JUMLAH		30

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal pada Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Padang Lawas Utara sudah terealisasi walaupun belum mencapai target seperti yang diharapkan. Permasalahan yang dihadapi dalam merealisasikan target yaitu :

a. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang timbul dalam pencapaian target SPM pada Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Belum optimalnya penegakan perda dan perkada Dimana masih belum kuatnya peraturan daerah terkait Tupoksi satuan polisi pamong praja
- Masih kurangnya pegawai PPNS Satpol PP Pada padang lawas utara dalam tindak lanjut penegakan peraturan dan peraturan kepala daerah
- Masih kurangnya personal ASN sesuai dengan kebutuhan di bidangnya masing – masing
- Kurangnya Kerjasama antar lintas sectoral dalam penegakan perda/perkada terutama dalam pengutipan PAD
- Masih kurangnya sarana prasarana penanggulangan pemadam kebakaran
- Masih kurangnya pos damkar disetiap Kecamatan yang jauh dari mako damkar sehingga bisa mempercepat respon time Ketika terjadi kejadian kebakaran
- Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran
- Belum Semua Desa Mendapat Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (perjenis bencana) dikarenakan kurangnya anggaran.
- Tidak semua Desa Tangguh Bencana (DESTANA) memiliki SK Tangguh Bencana

- Masih Kurangnya Koordinasi terhadap Lintas Sektor
- Masih Rendahnya Kesadaran masyarakat terhadap Resiko Bencana
- Masih Rendahnya Pemahaman masyarakat terhadap Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana

b. Solusi

Solusi yang dilaksanakan untuk merealisasikan target yang diharapkan untuk memberikan pelayanan publik yang prima yaitu:

- Satuan polisi pamong praja telah mengusulkan adanya perda tentang Tindak Pidana Ring (Tipiring) agar Aparat, Badan Usaha/Masyarakat yang melanggar Perda/Perkada mempunyai efek jera (tidak mengulangi lagi perbuatannya)
- Mengkoordinasikan dengan Pemerintahan Kabupaten Pdang Lawas Utara agar adanya Diklat PPNS bagi Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dalam tindak lanjut Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara
- Mengkoordinasikan dengan Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara tentang masih kurangnya personal ASN sesuai dengan kebutuhan bidangnya masing – masing
- Meningkatkan Koordinasi dan sinergi antar OPD terkait sehingga dapat menengakkan Perda dan Perkada
- Mengkoordinasikan dengan Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara perlu adanya penambahan anggaran untuk pengadaan sarana prasarana penanggulangan kebakaran khususnya mobil Damkar
- Mengkoordinasikan dengan Pemerintahan Padang Lawas Utara agar adanya Pos Damkar disetiap Kecamatan untuk mencegah dini dan meminimaliris terjadinya kejadian kebakaran di Kabupaten Padang Lawas Utara
- Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada tahap awal dibeberapa Kecamatan wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara

- Penambahan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah terkait kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten /Kota (perjenis bencana).
- Penambahan anggaran untuk menerbitkan SK Tangguh Bencana
- Melakukan Koordinasi yang lebih baik terhadap Lintas Sektor
- Melakukan Sosialisasi terhadap masyarakat terkait Resiko Bencana
- Melaksanakan Sosialisasi dan Pelatihan Pencegahan Kesiapsiagaan terhadap Penanggulangan Bencana Kepada Masyarakat.

4.6. URUSAN SOSIAL

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Pelayanan sosial adalah setiap pelayanan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial manusia, juga pelayanan yang diberikan kepada sebagian masyarakat yang kurang atau tidak beruntung Pelayanan sosial juga pelayanan kesejahteraan sosial mencakup pertolongan dan kepada golongan yang tidak beruntung seperti pelayanan sosial bagi anak yang terlantar, keluarga miskin, cacat, dll. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial adalah tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/ Kota, Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Urusan Sosial mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Skala Kabupaten/ Kota;
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;

4. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala kab/kota;
5. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial.

4.6.2. Target Pencapaian SPM

Target Pencapaian SPM Urusan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Padang Lawas Utara adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
1	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas telantar diluar panti sosial	Jumlah warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 Orang
2	Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar diluar panti sosial	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 Orang
3	Rehabilitas sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti sosial	Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 Orang
4	Rehabilitas sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	Jumlah Warga Negara / gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100 Orang
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana Kab/Kota yang memperoleh perlindungan dan Jaminan Sosial	63 KK

4.6.3. Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM bidang Sosial adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi
1	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang	Jumlah warga Negara penyandang disabilitas	100 Orang	60 Orang

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi
	disabilitas telantar diluar panti sosial	yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti		
2	Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar diluar panti sosial	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 Orang	20 Orang
3	Rehabilitas sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti sosial	Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 Orang	60 Orang
4	Rehabilitas sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	Jumlah Warga Negara / gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100 Orang	50 Orang
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana Kab/Kota yang memperoleh perlindungan dan Jaminan Sosial	63 KK	63 KK

4.6.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung Pencapaian SPM urusan Sosial Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 658.177.500,- (*Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*).

4.6.5. Dukungan Personil

1) Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	SD	0

2	SLTP/ Sederajat	0
3	SLTA/ Sederajat	1
4	D1	0
5	D2	0
6	D3	0
7	S1	13
8	S2	2
9	S3	0
JUMLAH		16

2) Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	I	0
2	II	1
3	III	11
4	IV	4
JUMLAH		16

3) Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon/ Jabatan

No	Eselon/ Jabatan	Jumlah
1	I	0
2	II	1
3	III	4
4	IV	1
5	Fungsional	10
JUMLAH		16

4.6.6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan target SPM urusan Sosial di Kabupaten Padang Lawas Utara adalah:

- Belum semua penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS) dapat tertangani karena adanya data yang valid;
- Terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap PMKS Dimana SDM, sarana dan prasarana kurang mendukung sehingga pelayanan tidak berjalan optimal.
- Minimnya Anggaran pada bidang Sosial, sehingga penanganan SPM sulit terpercayai.

b. Solusi

- Meningkatkan nilai bantuan dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait, lintas daerah dalam masalah penanganan Penyandangan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sehingga pelayanannya bisa lebih optimal.
- Dilakukannya pendapatan ulang bagi PMKS demi tercapainya data yang valid.
- Meningkatkan kualitas hidup PMKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PMKS dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan social;
- Perlunya pelatihan teknis terhadap PNS dan pendamping sosial dalam rangka meningkatkan kualitas ilmu dalam pelayanan sosial .
- Melakukan penganggaran Kembali untuk kegiatan yang menunjang pencapaian target SPM.



BAB V PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023 disusun sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan tertuang dalam Permendagri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023 mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, urusan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Dari penyelenggaraan urusan tersebut, dapat dilihat hasil dari capaian program dan kegiatan serta permasalahan dan pemecahan masalahnya. Permasalahan yang dihadapi dan hal-hal yang tidak tercapai dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran 2023 menjadi masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan tahun selanjutnya.

Selain LPPD ini, masukan dari masyarakat dalam memberikan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan, juga menjadi bahan pertimbangan sekaligus memberikan arti tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Kabupaten Padang Lawas Utara kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sumatera Utara secara akuntabilitas disajikan dalam dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2023.

Perkembangan pendapatan tahun 2023 dapat dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi penerimaan secara keseluruhan, dimana pada anggaran tahun 2023, APBD Kabupaten Padang Lawas Utara ditargetkan sebesar Rp. 1.488.414.389.631,- terealisasi sebesar Rp. 1.232.634.313.548,- atau 82,82%.

Keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2023 tersebut patut disyukuri, mengingat pencapaiannya



diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, baik jajaran Eksekutif maupun Legislatif, serta masyarakat secara luas.

Hasil yang telah dicapai dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023, selama ini mengindikasikan adanya komitmen yang kuat dari seluruh elemen Pemerintahan Daerah yang dapat dijadikan pondasi kokoh untuk meraih kinerja yang lebih optimal di masa mendatang. Di samping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu saja masih terdapat celah kekurangan yang perlu diperbaiki.

Demikian penyampaian LPPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023 ini, diiringi harapan semoga di tahun-tahun mendatang, keberhasilan senantiasa mengiringi segala upaya dan perjuangan kita demi kemajuan Daerah Padang Lawas Utara. Semoga Allah SWT memberkati kita semua.

Lampiran :
OPD yang tidak ada indikator dalam LPPD TA. 2023

1. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	URUSAN PENUNJANG	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Peningkatan Kualitas SDM Perencanaan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/Kabupaten Kota		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 orang	1 orang
			Peningkatan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		
				Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		
				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	3 dok	3 dok
			Peningkatan Kualitas Pengelolaan data informasi	Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		
				Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 dok	1 dok
			Peningkatan Kualitas pengendalian dan Evaluasi perencanaan dan penganggaran	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		
				Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	1 laporan	1 laporan
			Peningkatan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		
				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 lap	1 lap
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 lap	1 lap

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dok	1 dok
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	1 dok	1 dok
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, RKPD)	6 dok	6 dok
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1 lap	1 lap
			Peningkatan Perencanaan Pembangunan Berbasis Riset Penelitian, Pengembangan dan Inovasi	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		
				Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 dok	1 dok
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi		
				Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 dok	1 dok

Sumber : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara

2. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Sekretariat Dewan

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance dan Good Government) yang demokratis dan berlandaskan hukum	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		
			Pembinaan aparatur pemerintahan yang professional, berkompetensi dan memiliki integritas	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		
			Optimalisasi pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	10 Dok	1 Dok
			Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam agar tercipta sinkronisasi, sinergitas dalam rangka efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pemerintah	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 Dok	3 Dok
			Meningkatkan daya saing daerah dan sumber daya manusia aparatur	Penyelenggaraan Kajian Perundang - undangan	10 Dok	1 Dok
			Mendorong penegakan hukum yang konsisten dan pembinaan kehidupan masyarakat serta menjaga iklim yang kondusif untuk pengembangan dunia usaha	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan Naskah Akademik	20 Dok	0
			Meningkatkan integritas dalam rangka aktualisasi sesuai peraturan dan undang undang yang berlaku	Penyusunan Tata Tertib DPRD	1 Dok	0
			Peningkatan harmonisasi eksekutif dan legislatif	Pembahasan Kebijakan Anggaran		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI
				Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dok	1 Dok
				Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dok	1 Dok
				Pembahasan APBD	1 Dok	1 Dok
				Pembahasan APBD Perubahan	1 Dok	1 Dok
				Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dok	1 Dok
				Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Kecamatan	12 Kecamatan
				Peningkatan kapasitas DPRD		
				Pendalaman Tugas DPRD	30 Dewan	30 Dewan
				Publikasi dan Dokumentasi Dewan	2 Dok	2 Dok
				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	30 Dewan	30 Dewan
				Penyusunan Program Kerja DPRD	1 kali	1 Kali
				Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		
				Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	2 kali	Tidak dilaksanakan
				Pelaksanaan Reses	3 kali	3 kali
				Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		
				Pengawasan Kode Etik DPRD	3 Dok	3 Dok
				Fasilitasi Tugas DPRD		
				Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Tahun Anggaran	1 Tahun Anggaran
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	15 Dewan	15 Dewan

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara

3. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	Urusan Penunjang	Sekretariat Daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik.	3,50 (B)	3,75 (B)
				Persentase Kegiatan keagamaan Kabupaten	100%	100%
				Fasilitasi Keprotokolan dan Dokumentasi Pimpinan.	100 Kegiatan	100 Kegiatan
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penggunaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	B	B
				Persentase Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan secara elektronik yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100%	18%
			Meningkatkan Kapasitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja	60,00 (B)	64,15 (B)
				Nilai LPPD	2,60 (Sedang)	2,59 (Rendah)
				Jumlah segmen Batas yang telah ditetapkan dan unsur rupa bumi yang divalidasi	9 Segmen	9 Segmen
				Jumlah Produk Hukum	225	300
				Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	100%	100%
			Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kesejahteraan	100%	100%
			Meningkatnya investasi dalam rangka percepatan pembangunan daerah	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	22%	19%

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara

4. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	Pemerintahan umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		
				Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		
			Menumbuhkan semangat nasionalisme dan melestarikan nilai - nilai kebangsaan dalam masyarakat yang multi kultur	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	680 ORANG	680 ORANG
			mengembangkan dan mensosialisasikan arti penting nilai - nilai pancasila kepada aparatur dan masyarakat untuk memperkuat NKRI	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang ideologi Wawasan kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	4 KEGIATAN	4 KEGIATAN
				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		
				Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		
			Pengembangan demokratisasi melalui pendidikan politik bagi seluruh lapisan masyarakat (pemula, perempuan, marginal, dan disabilitas)	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3 KEGIATAN	3 KEGIATAN

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan		
			Sinergitas Ormas, Toleransi beragama dan etnisitas serta penguatan ekonomi seni dan budaya	Penyusunan Program kerja dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	107 ORANG	107 ORANG
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN BIDANG EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA		
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya		
			Sinergitas Ormas, Toleransi beragama dan etnisitas serta penguatan ekonomi seni dan budaya	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	284 ORANG	284 ORANG
			Sinergitas Ormas, Toleransi beragama dan etnisitas serta penguatan ekonomi seni dan budaya	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	107 ORANG	107 ORANG
				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		
			Penguatan GNRM (Gerakan Nasional Revolusi Mental) meliputi 5 (Lima)	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,	3 kegiatan	3 kegiatan

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI
			gerakan nasional (Melayani, bersih, tertib, mandiri, bersatu)	Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
			Penguatan GNRM (Gerakan Nasional Revolusi Mental) meliputi 5 (Lima) gerakan nasional (Melayani, bersih, tertib, mandiri, bersatu)	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 orang	100 orang

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara

5. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Padang Bolak

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG	KECAMATAN PADANG BOLAK	Optimalisasi kinerja aparatur Kantor Camat Padang Bolak dan Pemerintah Desa	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 kegiatan	1 kegiatan
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	17 desa	17 desa
2			Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik yang representative	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 kegiatan 150 Orang	1 kegiatan 150 Orang

Sumber : Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara

6. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Padang Bolak Tenggara

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG	KECAMATAN PADANG BOLAK TENGGARA	Mengoptimal fungsi koordinasi pemerintah kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Kegiatan	3 Kegiatan
				Administrasi Umum perangkat Daerah	6 Kegiatan	6 Kegiatan
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah	4 Kegiatan	4 Kegiatan
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan pemerintah daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan
				PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
				peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	1 kegiatan	1 Kegiatan
				PENYELENGGARAAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
				Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	1 kegiatan	1 Kegiatan
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		
				Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1 kegiatan	1 kegiatan

Sumber : Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara

7. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Padang Bolak Julu

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG	KECAMATAN PADANG BOLAK JULU	Optimalisasi kinerja aparaturn Kantor Camat Padang Bolak Julu dan Pemerintah Desa	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	23 desa 100 orang	23 desa 100 orang
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 desa 1 Tahun	13 desa 1 Tahun
			Peningkatan sarana dan prasarana	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI
			pelayanan publik yang representative			
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	60 orang	60 orang
			Mengoptimal fungsi koordinasi pemerintah kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		
				Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1 kegiatan	1 kegiatan

Sumber : Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara

8. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Batang Onang

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG	KECAMATAN BATANG ONANG	Optimalisasi kinerja aparatur Kantor Batang Onang dan Pemerintah Desa	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100 orang pada 32 desa	100 orang pada 32 desa
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah kader KB yang dibina 1 orang, kader posyandu yang dibina 20 posyandu, kader posyandu yang dilatih 50 orang dan relawan penanggulangan bencana 12 orang	kader KB yang dibina 1 orang, kader posyandu yang dibina 20 posyandu, kader posyandu yang dilatih 50 orang dan relawan penanggulangan bencana 12 orang
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		
				Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	50 orang	50 orang

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	drainase pemukiman 380 meter, sarana iar bersih dan sanitasi masyarakat mikin yang terpelihara 2 unit, sarana dan prasarana air limbah dibangun 1 unit, panjang jalan rabat beton yang dua rehabilitasi 50 meter.	Terbangunnya drainase pemukiman 380 meter, sarana iar bersih dan sanitasi masyarakat mikin yang terpelihara 2 unit, sarana dan prasarana air limbah dibangun 1 unit, panjang jalan rabat beton yang dua rehabilitasi 50 meter.
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 kegiatan	1 kegiatan
			Mengoptimal fungsi koordinasi pemerintah kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		
				Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1 kegiatan HUT RI, Kegiatan kepemudaan, pelaksanaan gotong royong	1 kegiatan HUT RI, Kegiatan kepemudaan, pelaksanaan gotong royong

Sumber : Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara

9. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Hulu Sihapas

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG	KECAMATAN HULU SIHAPAS	Optimalisasi kinerja aparaturn Kantor Camat Padang Bolak dan Pemerintah Desa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 TAHUN	1 TAHUN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 TAHUN	1 TAHUN

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 TAHUN	1 TAHUN
			Optimalisasi kinerja aparaturn Kantor Camat Hulu Sihapas dan Pemerintah Desa	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1 TAHUN	1 TAHUN
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	10 desa	10 desa

Sumber : Kecamatan Hulu Sihapas Kabupaten Padang Lawas Utara

10. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Portibi

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG	KECAMATAN PORTIBI	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik yang representative	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Kegiatan	1 Kegiatan
			Peningkatan penertiban, penataan dan pengelolaan keuangan Kantor Camat Portibi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 dokumen	1 dokumen

Sumber : Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara

11. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Dolok

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG	KECAMATAN DOLOK	Mengoptimal fungsi koordinasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI
			pemerintah kecamatan	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		
				Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1 KEGIATAN 86 Orang	1 KEGIATAN 86 Orang
			Peningkatan penertiban, penataan dan pengelolaan keuangan Kantor Camat Dolok	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	23 DESA 1 dok	23 DESA 1 dok
				Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentaraman dan Ketertiban Umum	5 DESA 1 laporan	5 DESA 1 laporan

Sumber : Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara

12. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Dolok Sigompulon

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG	KECAMATAN DOLOK SIGOMPULON	Optimalisasi kinerja aparatur Kantor Dolok Sigompulon dan Pemerintah Desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
				Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		
				Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	5 LEMBAGA KEMASYARAKATAN	5 LEMBAGA KEMASYARAKATAN
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI
				PEMERINTAHAN UMUM		
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		
				Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	150 orang	150 orang
				Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 orang	100 orang

Sumber : Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara

13. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Halongonan

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG	KECAMATAN HALONGONAN	Optimalisasi kinerja aparatur Kantor Camat Halongonan dan Pemerintah Desa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 TAHUN	1 TAHUN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 TAHUN	1 TAHUN
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 TAHUN	1 TAHUN
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 TAHUN	1 TAHUN

Sumber : Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara

14. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Halongonan Timur

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG	KECAMATAN HALONGONAN TIMUR	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik yang representif	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
				Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban		

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	200 Peserta	200 Peserta
			Optimalisasi kinerja aparaturn Kantor Camat Halongonan Timur dan pemerintahan Desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	100 Peserta	100 Peserta

Sumber : Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara

15. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Ujung Batu

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG	KECAMATAN UJUNG BATU	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik yang representative	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 kegiatan	1 kegiatan
			Peningkatan penertiban, penataan dan pengelolaan keuangan Kantor Camat Ujung Batu	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100 Peserta 1 dok	100 Peserta 1 dok
			Optimalisasi kinerja aparaturn Kantor Camat Ujung Batu dan Pemerintah Desa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 TAHUN	1 TAHUN
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 TAHUN	1 TAHUN

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 TAHUN	1 TAHUN

Sumber : Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara

16. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Simangambat

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET	REALISASI
1	PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG	KECAMATAN SIMANGAMBAT	Peningkatan penertiban, penataan dan pengelolaan keuangan Kantor Camat Simangambat	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	21 desa 100 orang	21 desa 100 orang
			Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik yang representative	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	50 orang	50 orang

Sumber : Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara

